

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Madukoro Blok AA – BB Kompleks PRPP Semarang
Telepon 024 – 7600247 PABX 7608533, 7603586, 7608581

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Renstra ini merupakan pedoman dan arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Tengah selama lima tahun ke depan, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, hingga indikator kinerja yang akan menjadi acuan dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak, berkelanjutan, serta berkeadilan.

Kami menyadari bahwa tantangan penyediaan hunian layak dan penataan kawasan permukiman semakin kompleks, seiring dengan meningkatnya kebutuhan rumah, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perubahan lingkungan dan iklim. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang inovatif, kolaboratif, dan adaptif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta menjadi pijakan dalam mewujudkan Jawa Tengah yang sejahtera, inklusif, dan berdaya saing melalui penyediaan permukiman layak huni.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah pembangunan daerah ini.

Semarang, September 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : BOEDYO DHARMAWAN, S.T., M.T.

NIP : 19691012 199803 1 003

Jabatan : Kepala Dinas berdasarkan SK Gubernur Nomor 800.1.3.3/290/ 2025

Tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bertugas untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 September 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


BOEDYO DHARMAWAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.1.1 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi.....	II-1
2.1.2 Susunan Organisasi.....	II-2
2.1.3 Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan/ Bidang dalam Tata Kerja Dinas ...	II-3
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-9
2.2.1 Pegawai	II-9
2.2.2 Bangunan Gedung	II-9
2.2.3 Kendaraan Dinas.....	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan PD.....	II-11
2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-52
2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II-54
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	III-1
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	III-5
3.3 Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah.....	III-8
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	IV-2
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.....	IV-41
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Instruksi ini mengamanatkan agar Gubernur memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, serta menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik.

Penyusunan Renstra dilakukan dengan pendekatan yang transparan, partisipatif, efektif, efisien, terukur, akuntabel, serta berorientasi pada hasil (outcome-oriented). Renstra ini juga mempertimbangkan unsur inovasi, kreativitas, dan pendekatan berbasis risiko (*risk-based planning*) agar mampu menjawab tantangan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanian di Provinsi Jawa Tengah secara optimal.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk periode 2025-2029 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sehingga selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, utamanya dalam sektor perumahan dan permukiman, serta sektor pertanian. Selain itu, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, beberapa regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang menjadi perhatian antara lain Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini berfungsi untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua kegiatan baik

yang sedang berlangsung maupun yang akan datang, serta dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi risiko serta mengoptimalkan pencapaian hasil pembangunan. Selain itu, Renstra juga menjadi alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kemajuan pelaksanaan tugas yang telah direncanakan.

Untuk memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan kebijakan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan Asta Cita Presiden RI 2025-2029 dalam misi ke-3 yaitu “meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur”, serta misi ke-6 yaitu “membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”. Selain itu, Renstra ini juga mendukung pencapaian visi misi daerah Provinsi Jawa Tengah, utamanya pada misi ke-4 yaitu “mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan melalui perencanaan tata ruang yang responsif”, dimana misi tersebut difokuskan untuk menciptakan keterpenuhan infrastruktur dan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, nyaman, dan berkelanjutan, serta memperhatikan konektivitas wilayah.

Dalam Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 berkaitan erat dengan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Yang menjadi jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi. Namun, tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban SPM, tetapi juga diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman, antara lain penanganan rumah tidak layak huni untuk mengurangi jumlah *backlog* kelayakan melalui peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat miskin, penyediaan rumah untuk mengurangi jumlah *backlog* kepemilikan perumahan melalui pembangunan baru bagi masyarakat miskin, peningkatan kualitas permukiman kumuh, serta kolaborasi lintas sektor dan kemitraan dengan swasta untuk mendukung penyediaan perumahan.

Seluruh kebijakan dan program dalam urusan ini juga diarahkan untuk responsif terhadap kebutuhan gender dan kelompok rentan, mengingat bahwa perempuan, terutama kepala keluarga perempuan, penyintas bencana, dan penyandang disabilitas, seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap perumahan yang layak dan aman. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik tempat tinggal, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, serta partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Integrasi perspektif gender menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan hunian yang inklusif, berkeadilan, dan mendukung kualitas hidup seluruh penghuni.

Selain membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa

Tengah juga membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang berkontribusi langsung dalam mendukung kelancaran pembangunan, khususnya dalam aspek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta pelaksanaan reforma agraria. Penyelenggaraan urusan ini diarahkan untuk mendukung kepastian hukum pertanahan, mendukung pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman, serta memperkuat tata kelola pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang dibuat setiap tahun dalam periode lima tahun. Selain itu, Renstra ini juga menjadi acuan utama dalam proses pengendalian dan evaluasi pembangunan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi tersebut mencakup peninjauan terhadap pencapaian target dalam Renstra maupun evaluasi terhadap pelaksanaan Renja, guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
24. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
25. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
26. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
27. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
 42. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 600/21 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
 43. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/39 Tahun 2024 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah;
 44. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 0007/0001565 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen teknis pelaksanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Tujuan dari disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Sebagai Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi; dan
- b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
- c. Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun serta capaian kinerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini paling sedikit memuat tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026, dan mengulas hambatan hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu periode tertentu. Sedangkan Sasaran merupakan kondisi hasil yang diharapkan agar tujuan dapat tercapai, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selain penjabaran dan penjelasan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, dalam subbab ini juga dijelaskan sub kegiatan yang mendukung program-program prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, regulasi ini disusun sebagai tindak lanjut dari Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Perangkat Daerah berperan sebagai unsur pendukung kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah memiliki peran dalam memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dikelola melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERAKIM). Urusan tersebut mencakup bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Selain menangani urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah juga bertanggung jawab atas urusan wajib yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sebagai Tipe A. Dinas ini bertugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan, dengan kedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi dinas akan dijabarkan lebih lanjut dalam masing-masing bidang atau urusan yang ada di dalamnya, sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

2.1.1 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman;

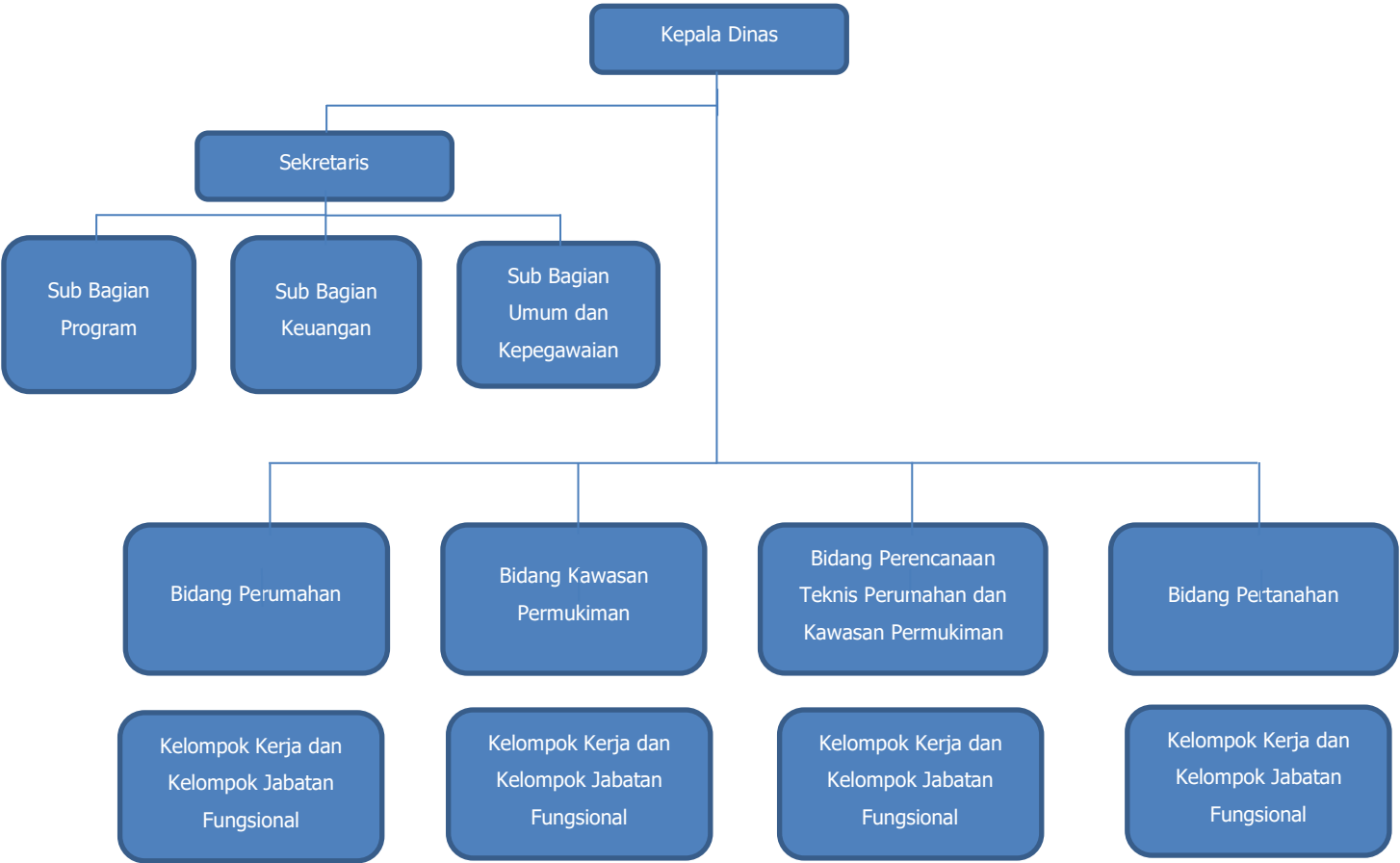
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

2.1.2 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Bidang Pertanahan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas merupakan posisi tertinggi dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari dinas terkait. Berikut merupakan gambaran bagan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah :



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Gambar 2.1. uraian susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- 1. **Kepala Dinas;**
- 2. **Sekretariat**, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. **Bidang Perumahan**, membawahkan Kelompok Kerja;
- 4. **Bidang Kawasan Permukiman**, membawahkan Kelompok Kerja;
- 5. **Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman**, membawahkan Kelompok Kerja;
- 6. **Bidang Pertanahan**, membawahkan Kelompok Kerja;
- 7. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

2.1.3 Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan/ Bidang dalam Tata Kerja Dinas

Dalam struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, memiliki peran dan fungsi spesifik yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinas secara menyeluruh. Pembagian tugas ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga tujuan serta sasaran pembangunan dapat tercapai dengan lebih optimal.

Dalam menjalankan tugasnya, DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas, yang bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan dan program kerja dinas. Kepala Dinas didukung oleh Sekretaris, beberapa Kepala Bidang yang mengelola urusan teknis sesuai bidangnya yang berperan dalam pelaksanaan teknis operasional di lapangan.

Tabel berikut menyajikan rincian tugas dan fungsi masing-masing bidang dalam satuan kerja DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1.
Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan/ Bidang

No	Struktur	Tugas	Fungsi	
1	Sekretariat	Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas	a.	pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas
			b.	pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas
			c.	pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas
			d.	pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas
			e.	pengelolaan informasi dan dokumentasi

No	Struktur	Tugas	Fungsi	
			f.	pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas
			g.	penyelenggaraan sistem pengendalian internal perangkat daerah
			h.	pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas
			i.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
2.	Bidang Perumahan	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan	a.	perumusan kebijakan terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pembiayaan perumahan, dan penyediaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat penanganan Backlog
			b.	pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pembiayaan perumahan, dan penyediaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat penanganan Backlog
			c.	pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pembiayaan perumahan, dan penyediaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat penanganan Backlog
			d.	monitoring dan evaluasi terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pembiayaan perumahan, dan penyediaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat penanganan Backlog
			e.	pelaporan dan rekomendasi terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pembiayaan perumahan, dan penyediaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat penanganan Backlog
			f.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Struktur	Tugas	Fungsi	
3	Bidang Kawasan Permukiman	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman	a.	perumusan kebijakan terkait penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
			b.	pelaksanaan kebijakan terkait penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
			c.	pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
			d.	monitoring dan evaluasi terkait penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
			e.	pelaporan dan rekomendasi terkait penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
			f.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4	Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman	a.	perumusan kebijakan terkait sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemitraan, pendayagunaan implementasi rekayasa teknologi, perencanaan sektoral perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan basis data
			b.	pelaksanaan kebijakan terkait sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemitraan, pendayagunaan implementasi rekayasa teknologi, perencanaan sektoral perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan basis data
			c.	pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemitraan, pendayagunaan implementasi rekayasa teknologi, perencanaan sektoral perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan basis data

No	Struktur	Tugas	Fungsi	
			d.	pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemitraan, pendayagunaan implementasi rekayasa teknologi, perencanaan sektoral perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan basis data
			e.	pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemitraan, pendayagunaan implementasi rekayasa teknologi, perencanaan sektoral perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan basis data
			f.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
5.	Bidang Pertanahan	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan	a.	perumusan kebijakan terkait perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyiapan data penyediaan lahan pembangunan kepentingan umum untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi pembangunan nasional, penyelesaian sengketa tanah dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan reforma agraria
			b.	pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyiapan data penyediaan lahan pembangunan kepentingan umum untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi pembangunan nasional, penyelesaian sengketa tanah dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan reforma agraria
			c.	pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyiapan data penyediaan lahan pembangunan kepentingan umum untuk perumahan masyarakat

No	Struktur	Tugas	Fungsi
			berpenghasilan rendah, penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi pembangunan nasional, penyelesaian sengketa tanah dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan reforma agraria
			d. monitoring dan evaluasi terkait perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyiapan data penyediaan lahan pembangunan kepentingan umum untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi pembangunan nasional, penyelesaian sengketa tanah dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan reforma agraria
			e. pelaporan dan rekomendasi terkait perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyiapan data penyediaan lahan pembangunan kepentingan umum untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi pembangunan nasional, penyelesaian sengketa tanah dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan reforma agraria
			f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

Tabel 2.2.
Tugas dan Fungsi Tiap Sub Bagian

No	Struktur	Sub Bagian/ Seksi/ Sub Koord	Tugas
1	Sekretariat	Subbagian Program	a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program
			b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program
			c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program
			d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas

No	Struktur	Sub Bagian/ Seksi/ Sub Koord	Tugas	
			e.	menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas
			f.	menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program
			g.	menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program
			h.	melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
		Subbagian Keuangan	a.	menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Keuangan;
			b.	menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan
			c.	menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan
			d.	menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
			e.	menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan
			f.	menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi
			g.	menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan
			h.	menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan
			i.	melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
		Subbagian Umum dan Kepegawaian	a.	menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian
			b.	menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
			c.	menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
			d.	menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas
			e.	menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas
			f.	menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas
			g.	menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas
			h.	menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas
			i.	menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas
			j.	menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian
			k.	menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian
			l.	melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Pegawai

Jumlah pegawai DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah sejumlah 80 orang, terdiri dari 45 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 35 orang pegawai berjenis kelamin perempuan. Jumlah pegawai apabila dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai	Tingkat Pendidikan						
	Dasar	Menengah		Tinggi			
	SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2
Jumlah	0	0	12	3	2	43	20
Pegawai	0	12		68			
TOTAL	80						

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Status Akhir Desember Tahun 2024)

Sedangkan, jika digolongkan berdasarkan golongan ruang, pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah Pegawai				Jumlah
	Laki-Laki		Perempuan		
IV	9	20%	3	9%	12
III	24	53%	28	80%	52
IX	6	13%	2	6%	8
II	6	13%	1	3%	7
VII	0	0%	1	3%	1
I	0	0%	0	0%	0
TOTAL					80

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Status Akhir Desember Tahun 2024)

Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan data pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 diatas, lebih banyak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sesuai dengan kualifikasi pada pekerjaan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kebutuhan tenaga pendukung (tingkat pendidikan menengah) sudah memenuhi menurut jumlah dan kualifikasi sehingga diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan.

2.2.2 Bangunan Gedung

Jumlah Bangunan Gedung yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ada 8 bangunan gedung yang memiliki kondisi baik yang berada di Jl.Madukoro Blok AA-BB, Kelurahan

Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Rincian bangunan gedung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NO	JENIS BARANG	KONDISI BANGUNAN	LOKASI	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung, Bangunan gedung kantor permanen	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	BANGUNAN UTAMA DISPERAKIM
2	Bangunan Gedung, Bangunan gedung kantor permanen	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	TIDAK DIGUNAKAN
3	Bangunan Gedung, Bangunan Tempat ibadah	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	
4	Bangunan Gedung, Gedung pos jaga permanen	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	
5	Bangunan Gedung, Bangunan gedung kantor permanen	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	
6	Bangunan Gedung, bangunan gedung kantor permanen	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	
7	Bangunan Gedung, bangunan gedung kantor permanen	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	
8	Bangunan Gedung, bangunan gedung kantor permanen	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Status Akhir Desember Tahun 2024)

2.2.3 Kendaraan Dinas

Jumlah mobil dinas yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Bagunan Gedung Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ada 14 mobil dinas dan 7 motor dinas yang memiliki kondisi baik. Rincian mobil dinas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Mobil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Barang	Tahun Pembelian	Keterangan				
			Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Ket
1	Toyota Innova Zenix	2023	MHFABAAA2P000238 8	MHBF3CG3CGJ00273 7	H 1194 XR	-	
2	Nissan X-Trail	2016	MHBF3CG3CGJ00273 7	MR20836833 B	H 40	M06538348	
3	Toyota Avanza	2014	MHKM1CA3JEK01862 5	DEJ9214	H 1833 XR	L02397742	
4	Toyota Innova	2014	MHFXW42G3E228817 4	1TR7792872	H 1834 XR	L-02397847	
5	Toyota Avanza Veloz	2013	MHKM1CA4JD K04794 9	DDV1249	H 1323 XW	K-06520346	

No	Jenis Barang	Tahun Pembelian	Keterangan				
			Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Ket
6	Toyota Innova	2010	MHFXW43G4A 405488 21	TR7051188	H 1106 XW	H-07357501I	
7	Toyota Innova	2010	MHFXW43G3A 405396 5	1TR7029710	H 1160 XW	H-06905498I	
8	Toyota Innova	2010	MHFXW43G0A 405482 91	TR7049767	H 1163 XW	H-06905499I	
9	Toyota Innova	2010	MHFXW43G8A 405491 7	1TR7045905	H 1099 XW	H069054971	
10	Nissan X-Trail	2010	MHBF2CG3AAJ 00409 0	MR20008482 R	H 1107 XW	H-07357661I	
11	Toyota Innova	2010	MHFXW43G5A 405481 2	1TR7048992	H 1162 XW	H-06905500I	
12	Toyota Innova	2009	MHFXW42G39 2149211	TR6839048	H 1640 XG	G-0809528I	
13	Honda CR-V	2009	MHRRE17409J 901731	R20A138142 88	H 1374 XG	G0476996I	
14	Honda Civic	2001	MHRS5AMPF1 L00106 7	F171402207	H 1375 XG	C-0490555I	
15	Honda Revo	2014	MH1KC4114E K34225 0	KC41E13408 89	H 6621 XZ	L09225787	
16	Honda Revo	2014	MH1KC4119E K34560 0	KC41E13439 50	H 6624 XZ	L09225786	
17	Honda	2010	MH1JBC115AK 98179 0	JBC1E197765 4	H 6097 XW	H-06904749	
18	Honda	2010	MH1JF8118AK 089809	JF81E109250 3	H 6101 XW	H-06904745	
19	Honda	2010	MH1JF8112AK 087179	JB81E108985 0	H 6105 XW	H-06904744	
20	Honda	2010	MH1JF811XAK 101037	JB81E110373 2	H 6098 VW	H-06904743	
21	Suzuki	2009	MH8BE4DFA9J 74994 9	E451ID78593 8	H 6264 XW	G-1013456I	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Status Akhir Desember Tahun 2024)

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Tugas pokok dan fungsi DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan. Fokus utamanya mencakup penanganan *backlog* kelayakan melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, penanganan *backlog* kepemilikan melalui pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, penanganan kawasan permukiman kumuh, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman. Selain itu, DISPERAKIM juga berperan dalam pembinaan kabupaten/ kota untuk mendukung program perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

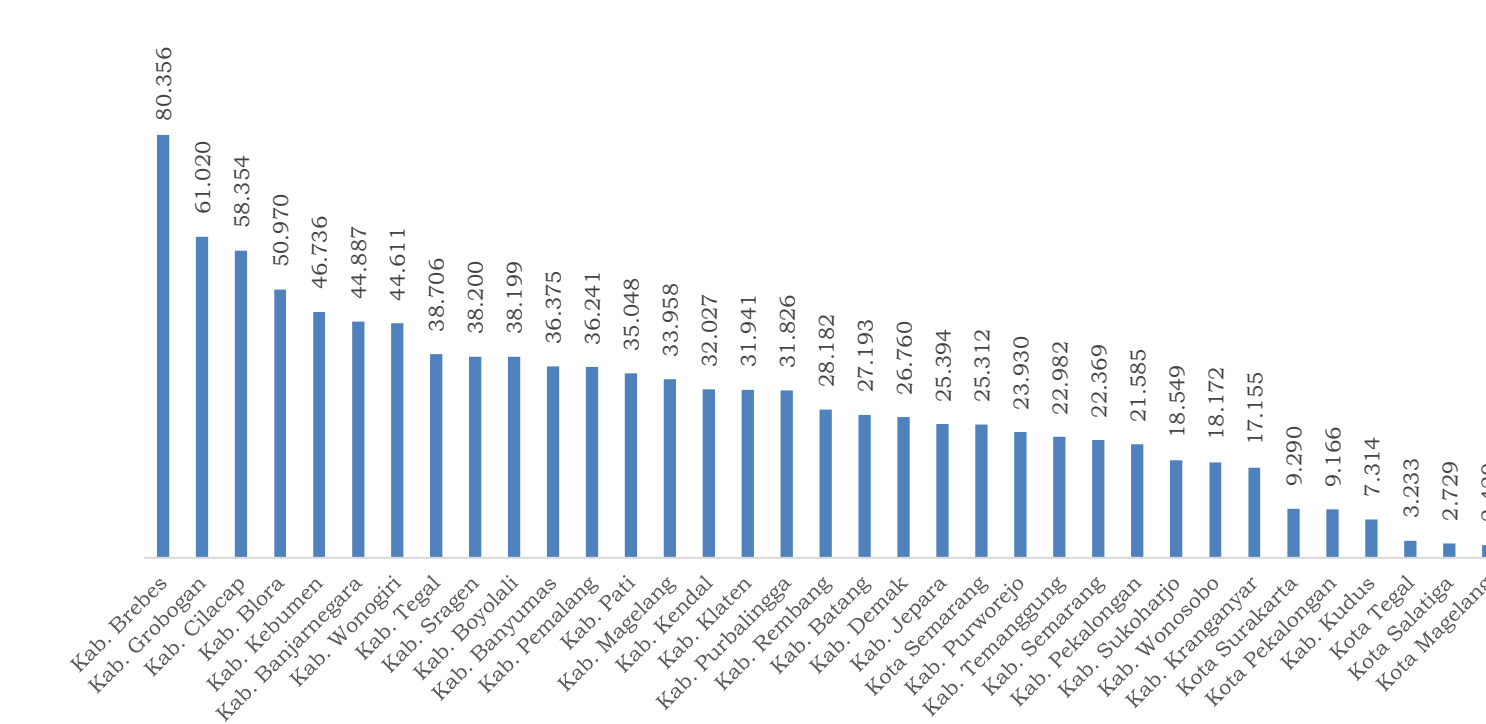
Dalam kaitannya dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), DISPERAKIM berkaitan erat dengan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

DISPERAKIM telah berhasil menyalurkan bantuan untuk mengentaskan *backlog* kelayakan dan *backlog* kepemilikan bagi puluhan ribu rumah tangga miskin dan menangani kawasan permukiman kumuh di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, seperti dinamika data pertumbuhan *backlog* kelayakan dan *backlog* kepemilikan, serta data pertumbuhan kawasan kumuh, dinamika kebijakan terkait perumahan dan kawasan permukiman, keterbatasan lahan, kurangnya data spasial yang akurat, adanya dampak perubahan iklim dan bencana alam, kelembagaan, serta permasalahan sosial di masyarakat.

Tingkat pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sasaran atau target yang ditetapkan dalam Renstra hingga Tahun 2024 dijabarkan pada penjelasan dibawah ini.

a) **Perumahan**

Berdasarkan dokumen RPD-Renstra Tahun 2024-2026, untuk indikator sasaran pertama, yakni ***persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat*** dapat memenuhi target. Pada Tahun 2024 dicatatkan realisasi sebesar 31,76% dari target 29,69% dimana tingkat ketercapaian untuk indikator ini mencapai 106,97%. Capaian tersebut diperhitungkan berdasarkan dari hasil intervensi penanganan *backlog* kelayakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari swasta/ BUMN/ BUMD dan peran masyarakat/ *stakeholders* terkait lainnya. Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, masih terdapat **1.582.024 unit** *backlog* kelayakan di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi *baseline* data RPJMD Periode 2018-2023. Namun, disamping daripada intervensi yang dilakukan, terjadi pertumbuhan jumlah *backlog* kelayakan berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang hingga pada Tahun 2024 pertumbuhan tersebut mencapai **1.051.190 unit**.



Sumber: Updating Data dan Rekom dengan SIMPERUM, diolah 2024

Gambar 2.2.
Pertumbuhan Backlog Kelayakan di Provinsi Jawa Tengah s.d. Tahun 2024

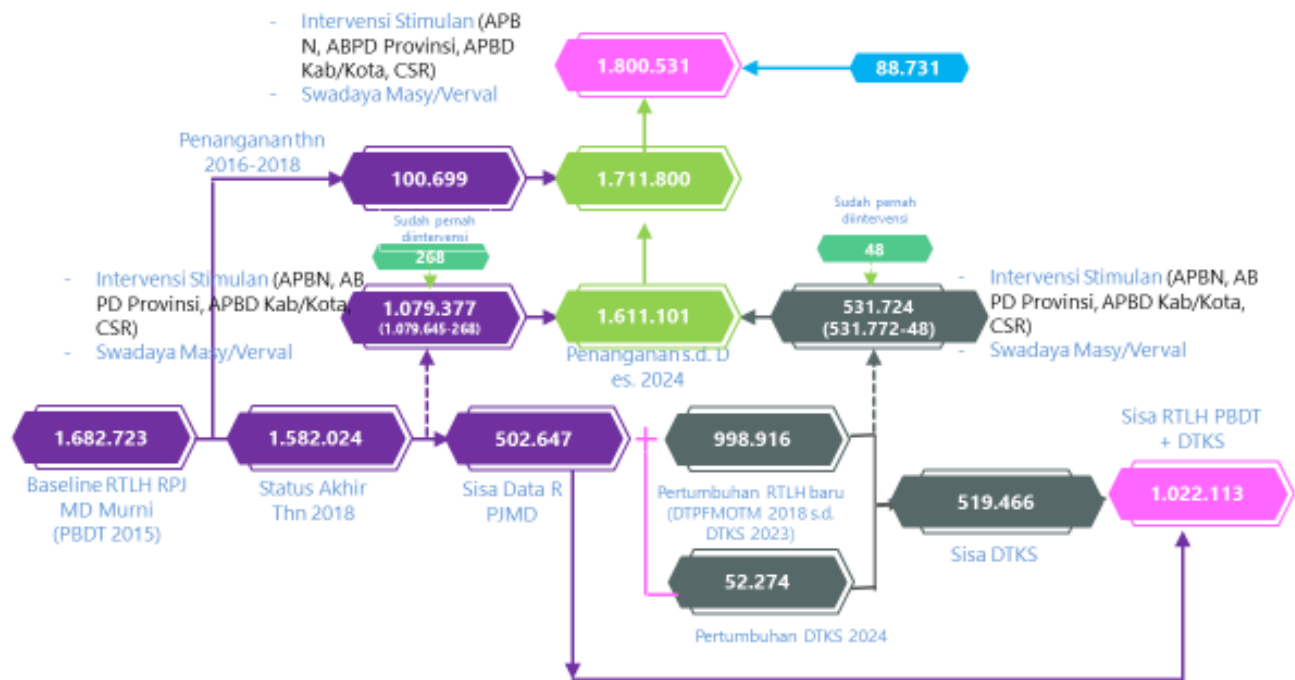
Penanganan RTLH secara umum mengintervensi 3 data, yaitu pada PBDT 2015, DTKS, dan Non DTKS. Total penanganan RTLH dari berbagai sumber anggaran, swadaya masyarakat, dan verivali lapangan telah dilaksanakan hingga pada Tahun 2024 mencapai **1.800.531 unit**, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.7.
Penanganan Backlog Kelayakan dari Berbagai Sumber Anggaran dan Swadaya Masyarakat/ Verivali Lapangan s.d. Desember Tahun 2024

NO	Sumber Anggaran	Interv Awal	s.d. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
I.	APBN		32.711	50.323	48.809	32.623	35.771	26.542	18.995	245.774
II.	APBD PROVINSI		52.690	23.208	10.298	11.293	11.487	16.592	17.535	143.103
	- Bankeupemdes	--	52.690	23.058	10.182	11.152	11.417	16.125	17.325	141.949
	- PK Bencana	--	--	--	--	118	51	345	175	689
	- PB Bencana	--	--	150	116	23	19	122	35	465
III.	APBD KAB. / KOTA		13.270	26.651	12.855	11.370	12.714	12.229	10.135	99.224
IV.	CSR		36.894	2.388	3.268	1.593	2.659	2.610	2.517	51.929
V.	SWADAYA MASYARAKAT/ VERIVALI	100.699	305.286	276.524	54.693	63.735	84.780	372.771	2.013	1.260.501
JUMLAH		100.699	440.851	379.094	129.923	120.614	147.411	430.744	51.195	1.800.531
KUMULATIF			541.550	920.644	1.050.567	1.171.181	1.318.592	1.749.336	1.800.531	

Sumber : Berbagai Sumber Pembiayaan pada Intervensi Stimulant RTLH, diolah, 2024

Secara ringkas, pergerakan data RTLH, baik intervensi maupun pertumbuhan RTLH baru dapat dijabarkan dalam skema berikut :



Sumber: Updating Data dan Rekom dengan SIMPERUM, diolah 2024

Gambar 2.3.
Skema Penanganan Backlog Kelayakan s.d. 2024
pada PBDT 2015; DTKS s.d. 2024; dan Non DTKS

Dari skema diatas, dapat diketahui bahwa berdasarkan dari data *backlog* kelayakan di Provinsi Jawa Tengah beserta penanganan yang telah dilaksanakan s.d. Tahun 2024, masih terdapat sisa *backlog* kelayakan yaitu sebanyak **1.022.113 unit** yang terdiri atas **502.647 unit** dari sisa data PBDT-2015 dan **519.466 unit** sisa dari data DTKS.

Tabel 2.8.
Sisa Backlog Kelayakan per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	PBDT	DTKS	Total
1	Kab. Banjarnegara	11.098	21.250	32.348
2	Kab. Banyumas	30.823	19.747	50.570
3	Kab. Batang	14.338	13.810	28.148
4	Kab. Blora	43.330	39.373	82.703
5	Kab. Boyolali	14.815	21.806	36.621
6	Kab. Brebes	18.296	34.831	53.127
7	Kab. Cilacap	33.563	37.395	70.958
8	Kab. Demak	32.971	16.918	49.889
9	Kab. Grobogan	60.517	45.611	106.128
10	Kab. Jepara	22.044	9.931	31.975
11	Kab. Karanganyar	2.794	8.673	11.467
12	Kab. Kebumen	11.587	12.766	24.353
13	Kab. Kendal	18.199	15.599	33.798
14	Kab. Klaten	5.262	13.698	18.960
15	Kab. Kudus	518	1.547	2.065
16	Kab. Magelang	16.111	14.158	30.269
17	Kab. Pati	37.268	17.956	55.224
18	Kab. Pekalongan	5.527	10.108	15.635
19	Kab. Pemalang	19.730	17.677	37.407

No	Kabupaten/ Kota	PBDT	DTKS	Total
20	Kab. Purbalingga	11.544	16.337	27.881
21	Kab. Purworejo	5.718	9.841	15.559
22	Kab. Rembang	19.322	17.261	36.583
23	Kab. Semarang	10.690	9.462	20.152
24	Kab. Sragen	14.589	18.425	33.014
25	Kab. Sukoharjo	4.597	5.676	10.273
26	Kab. Tegal	10.551	16.183	26.734
27	Kab. Temanggung	10.596	11.962	22.558
28	Kab. Wonogiri	5.423	10.582	16.005
29	Kab. Wonosobo	9.741	7.998	17.739
30	Kota Magelang	64	745	809
31	Kota Pekalongan	400	3.718	4.118
32	Kota Salatiga	312	708	1.020
33	Kota Semarang	-	13.304	13.304
34	Kota Surakarta	217	4.049	4.266
35	Kota Tegal	92	361	453
Jumlah		502.647	519.466	1.022.113

Sumber: Updating DATA & Rekom dengan SIMPERUM, diolah 2024

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, program pengembangan perumahan menjadi program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian program prioritas Gubernur “Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 Rumah Layak Huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional” serta mendukung pencapaian program aksi Gubernur “Mendorong Pembangunan Rumah Apung Kawasan Pesisir” dan program taktis Gubernur “Fasilitasi Rumah Susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan Swasta”.

Selain itu, sebagai wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem, penanganan sisa *backlog* kelayakan tersebut direncanakan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka panjang, yakni selama 20 tahun ke depan menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Strategi ini disusun dengan pendekatan kolaboratif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan lintas tingkat pemerintahan serta sektor swasta dan masyarakat.

Melalui skema ini, Gubernur mendelegasikan sebagian tanggung jawab pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan tetap memberikan fasilitasi, arah kebijakan serta dukungan teknis. Model *collaborative funding* ini diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya fiskal yang tersedia, mencegah terjadinya tumpang tindih program, serta mempercepat penanganan *backlog* kelayakan secara lebih adil dan merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. Proporsi penanganan *backlog* kelayakan ini akan dibagi secara sebagai berikut :

- 20% akan ditangani oleh Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta sektor *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari dunia usaha. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif dari sektor filantropi dan swasta dalam mendukung pembangunan sosial.
- 30% ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai bentuk komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya, serta mempercepat pengurangan *backlog* perumahan.

- 30% menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diharapkan dapat lebih responsif dalam menyasar rumah-rumah tidak layak huni di wilayah administratif masing-masing, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.
- 20% sisanya akan ditangani oleh Pemerintah Desa, melalui pemanfaatan Dana Desa dan program-program pemberdayaan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan partisipasi warga.

Melalui pendekatan berbasis kolaborasi dan proporsi penanganan yang seimbang ini, diharapkan permasalahan *backlog* kelayakan di Jawa Tengah dapat diselesaikan secara tuntas dan berkeadilan dalam kurun waktu dua dekade ke depan. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh alokasi anggaran, tetapi juga sangat bergantung pada penguatan data yang akurat, perencanaan yang matang, partisipasi aktif masyarakat, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.

Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Provinsi Jawa Tengah optimis dapat mewujudkan hunian layak bagi seluruh warganya sebagai bagian dari upaya nyata menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*), khususnya pada tujuan ke-11 : Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.

Tabel 2.9.
Skenario Penanganan *Backlog* Kelayakan 2026-2030

No	Target Penanganan per Tahun	Sat.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pemerintah Pusat dan	Unit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	Baznas/ CSR	Unit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Pemerintah Provinsi	Unit	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Pemerintah Kabupaten/ Kota	Unit	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	Pemerintah Desa	Unit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Partisipasi Masyarakat	Unit						
Total per Tahun		Unit	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Total 2026-2030		Unit	303.000					

Sedangkan, untuk indikator sasaran ke-2, yakni ***persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat*** juga dapat memenuhi target dengan realisasi 20,33% dari target 20,14% sehingga tingkat ketercapaiannya mencapai 100,94%. Capaian tersebut diperhitungkan berdasarkan dari penyediaan rumah layak huni baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari swasta/ BUMN/ BUMD dan peran masyarakat/ *stakeholders* terkait lainnya, yang secara rinci dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.10.
Penyediaan Rumah Layak Huni dari Berbagai Sumber Anggaran dan Swadaya Masyarakat/ Verivali Lapangan s.d. Desember Tahun 2024

SUMBER	JUMLAH UNIT RUMAH/ PEMBANGUNAN BARU (unit)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
APBN	1.279	25	220	2.201	221	629	4.575
- Satker Strategis PP	1.073	25	--	4	--	--	1.102
- SNVT PnP Jateng	206	--	220	--	88	192	706
- PB DAK	--	--	--	2.197	103	437	2.737
- Dana Desa	--	--	--	--	16	--	16
- Kemensos	--	--	--	--	14	--	14
APBD PROVINSI	--	200	186	326	900	581	2.193
- PB Backlog	--	200	186	253	615	328	1.582
- PB Relokasi	--	--	--	73	285	253	611
APBD KABUPATEN/ KOTA	--	--	--	143	151	107	401
- PB Backlog	--	--	--	143	63	71	277
- PB Relokasi	--	--	--	--	88	36	124
ASOSIASI PERUMAHAN	11.483	30.193	30.595	24.709	57.364	52.986	207.330
CSR/ LAINNYA	--	--	5.799	224	3.858	818	10.699
- Swadaya Masyarakat, pada permintaan IMB dari DPMPTSP Kab/Kota	--	--	5.799	--	3.830	754	10.383
- CSR	--	--	--	224	28	64	316
JUMLAH	12.762	30.418	36.800	27.603	62.494	55.121	225.198
KUMULATIF	12.762	43.180	79.980	107.583	170.077	225.198	

Sumber : Berbagai sumber pembiayaan pada realisasi pembangunan rumah baru, diolah, 2024

Sebaran *backlog* kepemilikan status Desember 2024 sebagaimana Tabel 3.5 dibawah ini. Berdasarkan data Simperum pada akhir 2024, di Provinsi Jawa Tengah masih terdapat 324.803 jiwa yang belum memiliki rumah.

Tabel 2.11.
Sebaran *Backlog* Kepemilikan di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah status Desember Tahun 2024

NO	Kabupaten/ Kota	Backlog Miskin
1	Kabupaten Banjarnegara	5.574
2	Kabupaten Banyumas	11.363
3	Kabupaten Batang	4.399
4	Kabupaten Blora	4.601
5	Kabupaten Boyolali	6.565
6	Kabupaten Brebes	22.406
7	Kabupaten Cilacap	12.349
8	Kabupaten Demak	8.623
9	Kabupaten Grobogan	8.512
10	Kabupaten Jepara	10.319
11	Kabupaten Karanganyar	5.726
12	Kabupaten Kebumen	12.503
13	Kabupaten Kendal	10.620
14	Kabupaten Klaten	21.539
15	Kabupaten Kudus	3.210
16	Kabupaten Magelang	7.907
17	Kabupaten Pati	9.292
18	Kabupaten Pekalongan	10.097
19	Kabupaten Pemalang	13.144

NO	Kabupaten/ Kota	Backlog Miskin
20	Kabupaten Purbalingga	6.188
21	Kabupaten Purworejo	12.044
22	Kabupaten Rembang	3.783
23	Kabupaten Semarang	4.442
24	Kabupaten Sragen	5.631
25	Kabupaten Sukoharjo	11.974
26	Kabupaten Tegal	22.095
27	Kabupaten Temanggung	4.990
28	Kabupaten Wonogiri	2.657
29	Kabupaten Wonosobo	4.933
30	Kota Magelang	3.364
31	Kota Pekalongan	7.093
32	Kota Salatiga	1.896
33	Kota Semarang	21.119
34	Kota Surakarta	16.990
35	Kota Tegal	6.855
JUMLAH		324.803

Sumber : *Simperum, 2024*

Selain itu, kebutuhan rumah layak huni juga dapat disebabkan karena adanya faktor geografi yaitu bencana alam. Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang pada Tahun 2022 jumlah rumah tidak layak huni dari 2.440 jumlah kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah terdapat 611 unit rumah rusak berat, 869 unit rumah rusak sedang, dan 4.616 unit rumah rusak ringan.

b) Kawasan Permukiman

Berdasarkan dokumen RPD-Renstra Tahun 2024-2026, untuk indikator sasaran ketiga, yakni ***persentase penurunan kawasan kumuh*** telah memenuhi target, berdasarkan hasil intervensi penanganan kawasan permukiman kumuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan masing – masing. Penanganan kawasan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi kawasan permukiman kumuh dan penetapan kawasan permukiman kumuh melalui Surat Keputusan Walikota/Bupati. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan luasan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu dibawah 10 Ha, antara 10-15 Ha dan di atas 15 Ha. Luasan kumuh dibawah 10 ha menjadi kewenangan kabupaten/ kota, luasan kumuh 10-15 Ha merupakan kewenangan Provinsi, serta luasan kumuh di atas 15 Ha merupakan kewenangan Pusat. Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan dalam melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang mempunyai luas 10-15 Ha.

Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DISPERAKIM melakukan identifikasi dan menetapkan kawasan permukiman kumuh seluas **3.004,59 Ha** dengan kumuh 10-15 Ha seluas **474,66 Ha**. Penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati/ Walikota sampai dengan Tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah menyisakan luasan kawasan kumuh sebesar **571,10 Ha** sedangkan untuk sisa luasan kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi (10 – 15 Ha) adalah sebesar **152,85 Ha**. Namun, terjadi penambahan kawasan permukiman kumuh sampai dengan Tahun 2022 menjadi **10.671,84 Ha**. Beberapa penanganan telah dilakukan untuk menangani kawasan permukiman

kumuh, hingga pada akhir Tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah sisa kawasan permukiman kumuh total di Provinsi Jawa Tengah sebesar **6.094,91 Ha**, dan untuk sisa luasan kawasan kumuh kewenangan Provinsi (10 – 15 Ha) adalah sebesar **1.101,40 Ha**.

Tabel 2.12.
Luasan Kawasan Permukiman Kumuh s.d. Tahun 2022
(Baseline RPD Tahun 2024-2026)

Tanggung Jawab dan Peran	RPJMD 2019 -2023			Baseline RPD	
	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh s.d. 2022			Sisa Non RPJMD	TOTAL
	Luasan Awal Baseline RPJMD (Ha)	Penanganan Baseline RPJMD s.d 2022	Sisa Baseline RPJMD		
< 10 Ha	629,01	519,42	109,59	977,60	1,087,19
10-15 Ha	474,66	321,80	152,86	948,16	1.101,02
> 15 Ha	1.900,92	1.592,27	308,65	3.598,26	3.906,91
Jumlah	3.004,59	2.433,49	571,10	5.523,80	6.094,91

Sumber: Dari berbagai sumber pembiayaan, diolah Desember 2024

Sesuai Baseline RPD tahun 2024-2026, pada tahun 2023 telah tertangani seluas **832,91 Ha** dan pada tahun 2024 tertangani seluas **1.376,99 Ha**, secara lebih jelas sebagaimana rincian tabel berikut :

Tabel 2.13.
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh sesuai Baseline RPD Prov. Jateng
Tahun 2024-2026 periode Penanganan Tahun 2023 – Tahun 2024

Tanggung Jawab dan Peran	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Sesuai Baseline RPD 2024-2026											
	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh s.d. 2022 (Baseline RPD)			Penanganan Tahun 2023			Penanganan Tahun 2024			Total Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh s.d. 2024		
	Sisa Kaw. Kumuh dari Baseline RPJMD 2019-2023	Non RPJMD	Total Luasan Kaw. Kumuh Baseline RPD	Baseline RPJMD	Non RPJMD	TOTAL	Baseline RPJMD	Non RPJMD	TOTAL	Baseline RPJMD	Non RPJMD	TOTAL
< 10 Ha	109,59	977,60	1,087,19	85,47	34,19	119,66	1,51	315,53	317,04	1,51	435,19	436,70
10-15 Ha	152,86	948,17	1.101,02	120,20	16,61	136,81	4,80	253,29	258,09	4,80	390,09	394,90
> 15 Ha	308,65	3.598,04	3.906,91	78,24	498,20	576,44	37,79	764,06	801,86	37,79	1.340,51	1378,30
Jumlah	571,10	5.523,80	6.094,91	283,91	549,00	832,91	44,11	1.332,88	1.376,99	44,11	2.165,79	2.209,90

Sumber: Dari berbagai sumber pembiayaan, diolah Desember 2024

Penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai baseline RPD 2024-2026 adalah seluas 2.209,90 Ha atau sebanyak 95 kawasan permukiman kumuh. Sisa kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah masih ada sebanyak 435 kawasan atau seluas 3.885,01 Ha yang secara detail disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.14.
Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Prov. Jateng Tahun 2024 sesuai
Baseline RPD Tahun 2024-2026

Tanggung Jawab dan Peran	Luasan Kawasan Kumuh Baseline RPD Tahun 2024-2026				Penanganan s.d. 2024 (Ha)	% Capaian Kumulatif s.d. Tahun 2024	Sisa Kawasan Kumuh	
	Luasan (Ha)	Jumlah Kawasan	Baseline RPJMD	Non RPJMD			Luasan (Ha)	Jumlah Kawasan
Kab/Kota (< 10 Ha)	1.087,192	237	109,60	977,60	436,702	40,17%	650,490	165
Provinsi (10-15 Ha)	1.101,021	108	152,85	948,17	394,897	35,87%	706,124	94
Pusat (> 15 Ha)	3.906,695	185	308,65	3.598,04	1378,304	35,28%	2528,391	176
Jumlah	6.094,91	530	571,10	5.523,81	2.209,902	36,26%	3.885,006	435

***Sumber:** Dari berbagai sumber pembiayaan, diolah Desember 2024*

Namun, pada Tahun 2024 s.d. awal Tahun 2025 telah dilaksanakan review ulang SK Kumuh Kabupaten/ Kota dalam rangka penyusunan RPJMN 2025-2029, sehingga luasan kumuh sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 sebesar 5.203,43 Ha dengan perincian pada tabel berikut :

Tabel 2.15.

Luasan Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Jawa Tengah s.d Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Luasan Berdasarkan SK Berkembang Tahun 2025				Total	Penanganan s.d. Tahun 2025 TW I			Total	Sisa Luasan Tahun 2025			Total
		SK Kumuh	<10	10-15	>15		<10	10-15	>15		<10	10-15	>15	
1	Kab. Cilacap	2020	0,00	13,15	126,33	139,48	0,00	13,15	82,57	95,72	0,00	0,00	43,76	43,76
2	Kab. Banyumas	2020	32,76	27,67	55,27	115,70	15,89	19,33	28,90	64,12	16,87	8,34	26,37	51,58
3	Kab. Purbalingga	2021	80,40	48,91	214,97	344,28	23,70	3,60	51,64	78,94	56,70	45,31	163,33	265,34
4	Kab. Banjarnegara	2021	83,51	96,15	292,30	471,96	5,52	12,45	21,75	39,72	77,99	83,70	270,55	432,24
5	Kab. Kebumen	2025	99,20	52,14	0,00	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	52,14	0,00	151,34
6	Kab. Purworejo	2020	15,09	23,50	88,22	126,81	10,82	17,91	88,22	116,95	4,27	5,60	0,00	9,87
7	Kab. Wonosobo	2021	71,63	124,00	624,36	820,00	17,09	27,15	179,67	223,92	54,54	96,85	444,69	596,08
8	Kab. Magelang	2022	116,86	81,94	53,26	252,06	3,46	7,28	0,00	10,74	113,40	74,66	53,26	241,32
9	Kab. Boyolali	2020	0,00	12,69	75,16	87,85	0,00	12,69	43,44	56,13	0,00	0,00	31,72	31,72
10	Kab. Klaten	2023	23,34	37,86	84,56	145,75	4,48	27,72	45,38	77,58	18,86	10,14	39,18	68,18
11	Kab. Sukoharjo	2023	455,35	51,63	113,07	620,06	11,71	0,00	0,00	11,71	443,64	51,63	113,07	608,35
12	Kab. Wonogiri	2022	8,98	24,65	37,87	71,50	8,98	7,92	6,14	23,04	0,00	16,73	31,73	48,46
13	Kab. Karanganyar	2020	79,52	10,38	17,34	107,24	21,61	0,13	4,50	26,24	57,91	10,25	12,84	81,00
14	Kab. Sragen	2022	45,37	22,11	47,03	114,51	38,62	22,11	40,75	101,48	6,75	0,00	6,28	13,03
15	Kab. Grobogan	2020	54,83	0,00	98,88	153,71	24,20	0,00	30,82	55,02	30,63	0,00	68,06	98,69
16	Kab. Blora	2022	56,94	12,16	300,18	369,28	21,16	0,00	23,70	44,86	35,78	12,16	276,48	324,42
17	Kab. Rembang	2020	88,23	96,20	162,80	347,23	52,04	42,16	71,28	165,48	36,19	54,04	91,53	181,75
18	Kab. Pati	2021	48,04	91,73	38,12	177,89	47,24	71,74	33,97	152,95	0,80	19,99	4,15	24,94
19	Kab. Kudus	2023	25,77	0,00	60,23	86,01	19,27	0,00	36,28	55,55	6,50	0,00	23,96	30,46
20	Kab. Jepara	2022	46,98	0,00	20,76	67,7 4	5,38	0,00	0,01	5,39	41,60	0,00	20,75	62,35
21	Kab. Demak	2021	6,38	62,33	142,89	211,60	6,38	21,88	74,47	102,72	0,00	40,46	68,42	108,88
22	Kab. Semarang	2025	40,91	10,17	130,30	181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	10,17	130,30	181,37
23	Kab. Temanggung	2021	5,92	29,54	141,38	176,84	2,25	8,73	75,32	86,30	3,67	20,81	66,06	90,54
24	Kab. Kendal	2025	52,73	10,32	33,10	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	10,32	33,10	96,15

No	Kabupaten/Kota	Luasan Berdasarkan SK Berkembang Tahun 2025				Total	Penanganan s.d. Tahun 2025 TW I			Total	Sisa Luasan Tahun 2025			Total
		SK Kumuh	<10	10-15	>15		<10	10-15	>15		<10	10-15	>15	
25	Kab. Batang	2023	23,66	10,75	70,97	105,38	18,13	0,00	22,43	40,56	5,53	10,75	48,54	64,82
26	Kab. Pekalongan	2021	49,11	53,90	241,20	344,21	29,83	32,11	68,90	130,83	19,28	21,79	172,30	213,38
27	Kab. Pemalang	2024	0,00	10,81	187,45	198,26	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	10,81	186,35	197,16
28	Kab. Tegal	2025	32,16	36,82	105,20	174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	36,82	105,20	174,19
29	Kab. Brebes	2025	258,12	69,18	82,21	409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	258,12	69,18	82,21	409,51
30	Kota Magelang	2022	16,23	10,07	0,00	26,30	10,60	5,11	0,00	15,71	5,63	4,96	0,00	10,59
31	Kota Surakarta	2024	32,70	0,00	30,57	63,27	3,97	0,00	1,90	5,87	28,73	0,00	28,67	57,40
32	Kota Salatiga	2024	28,77	0,00	0,00	28,77	2,88	0,00	0,00	2,88	25,89	0,00	0,00	25,89
33	Kota Semarang	2021	139,54	90,39	201,61	431,54	127,18	75,26	184,52	386,96	12,36	15,13	17,09	44,58
34	Kota Pekalongan	2024	27,64	12,66	103,47	143,77	4,43	0,00	13,02	17,45	23,21	12,66	90,45	126,32
35	Kota Tegal	2022	20,44	0,00	170,71	191,15	20,44	0,00	132,91	153,35	0,00	0,00	37,80	37,80
Jumlah Hasil Rekap			2.167,11	1.233,81	4.151,77	7.552,70	557,27	428,42	1.363,58	2.349,26	1.609,84	805,40	2.788,19	5.203,43

Sumber: SK Kawasan Kumuh Kabupaten Kota, diolah, 2025

Tabel 2.16.
Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh di Jawa Tengah
s.d Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sisa Kawasan			Total
		<10	10-15	>15	
1	Kab. Cilacap	0	0	5	5
2	Kab. Banyumas	9	2	3	14
3	Kab. Purbalingga	11	4	8	23
4	Kab. Banjarnegara	14	8	11	33
5	Kab. Kebumen	22	4	0	26
6	Kab. Purworejo	2	2	0	4
7	Kab. Wonosobo	10	10	19	39
8	Kab. Magelang	15	7	3	25
9	Kab. Boyolali	0	0	4	4
10	Kab. Klaten	3	1	3	7
11	Kab. Sukoharjo	121	4	5	130
12	Kab. Wonogiri	0	2	2	4
13	Kab. Karanganyar	14	1	1	16
14	Kab. Sragen	2	0	1	3
15	Kab. Grobogan	10	0	5	15
16	Kab. Blora	7	1	12	20
17	Kab. Rembang	9	6	6	21
18	Kab. Pati	1	3	1	5
19	Kab. Kudus	3	0	3	6
20	Kab. Jepara	7	0	1	8
21	Kab. Demak	0	5	8	13
22	Kab. Semarang	12	1	4	17
23	Kab. Temanggung	1	2	6	9
24	Kab. Kendal	11	1	2	14
25	Kab. Batang	3	1	3	7
26	Kab. Pekalongan	5	5	9	19
27	Kab. Pemalang	0	1	6	7
28	Kab. Tegal	6	3	5	14
29	Kab. Brebes	64	6	4	74
30	Kota Magelang	3	1	0	4
31	Kota Surakarta	13	0	2	15
32	Kota Salatiga	8	0	0	8
33	Kota Semarang	9	6	6	21
34	Kota Pekalongan	9	1	4	14
35	Kota Tegal	0	0	3	3
Jumlah Hasil Rekap		404	88	155	647

Sumber: SK Kawasan Kumuh Kabupaten Kota, diolah, 2025

c) Pertanahan

Pada indikator sasaran keempat yakni ***persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum***, serta sasaran kelima yakni ***persentase pelaksanaan reforma agrarian oleh gugus tugas reforma agraria*** telah memenuhi target sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi. Urusan Pertanahan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Pemberian izin lokasi

lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah Provinsi, Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi.

Pada Tahun 2024, untuk mendukung kegiatan pembangunan yang ada di Jawa Tengah khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, lingkup bidang pertanahan merupakan supporting kegiatan pembangunan fisik yaitu dengan mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan keluaran ditetapkan ijin penetapan lokasi yang bertujuan agar tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat dipermainkan makelar tanah dan diharapkan mendapat ganti kerugian yang layak dari pemerintah. Penetapan lokasi yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020-2024 berdasarkan kriteria pembangunannya adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.17.
Penetapan Lokasi s.d. Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Penetapan Lokasi	Nomor	Tahun	Keterangan	PSN
	Pembangunan jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api				
1	Persetujuan Perpanjangan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Tambahan Ruas Jalan Tol Trans Jawa	590/14 24 Februari 2020 (TOL TRANS JAWA)	2020	Habis pada tanggal 24 Februari 2021	Tidak
2	Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalur Rel Ganda Kereta Api Solobalapan-Walikukun Kabupaten Sragen	590/33 6 Juli 2020 (KAI SOLOBALAPAN-WALIKUKUN)	2020	Habis pada tanggal 6 Juli 2022	Ya
3	Pembaruan Kedua Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah	590/34 6 Juli 2020 (TOL TRANS JAWA)	2020	Habis pada tanggal 6 Juli 2022	Tidak
4	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta Di	590/38 27 Juli 2020	2020	Habis pada tanggal 27 Juli 2022	Ya

No	Nama Penetapan Lokasi	Nomor	Tahun	Keterangan	PSN
	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali	(JALAN TOL SOLO – YOGYA)			
5	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta di Kabupaten Klaten	590/48 15-Sep-20 (JALAN TOL SOLO – YOGYA)	2020	Habis pada tanggal 15-Sep-22	Ya
6	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Tol Solo-Mantingan di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen	550/01 15 Januari 2021 (JALAN TOL SOLO - MANTINGAN)	2021	Habis Pada Tanggal 15 Januari 2023	Ya
7	Pembaruan Kedua Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Pekalongan-Semarang Di Provinsi Jawa Tengah	590/02 15 Februari 2021 (JALUR REL KERETA API LINTAS UTARA)	2021	Habis Pada Tanggal 15 Januari 2023	Ya
8	Pembaruan Kedua Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Semarang Tawang- Bojonegoro Di Provinsi	590/03 15 Februari 2021 (JALUR REL KERETA API LINTAS UTARA)	2021	Habis Pada Tanggal 15 Februari 2023	Ya
9	Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Tambahan Ruas Jalan Tol Trans Jawa	590/12 17 Mei 2021 (TAMBAHAN RUAS JALAN TOL TRANS JAWA)	2021	Habis Pada Tanggal 17 Mei 2023	Tidak
10	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak	590/38 22-Nov-21 (TANAH SISA TOL SEMARANG - DEMAK)	2021	Habis Pada Tanggal 22 November 2024	Ya
11	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Di Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang	590/12 14 April 2022	2022	Habis Pada Tanggal 14 April 2025	Ya
12	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Di Kabupaten Magelang	590/13 20 April 2022	2022	Habis Pada Tanggal 20 April 2025	Ya
13	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Di Kabupaten Semarang	590/14 21 April 2022	2022	Habis Pada Tanggal 21 April 2025	Ya
14	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Bagi Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi 2	590/20 12 Juli 2022	2022	Habis Pada Tanggal 12 Juli 2025	Ya
15	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta Di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali	590/23 27 Juli 2022	2022	Habis Pada Tanggal 27 Juli 2023	Ya

No	Nama Penetapan Lokasi	Nomor	Tahun	Keterangan	PSN
16	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta Di Kabupaten Klaten	590/34 12 September 2022	2022	Habis Pada Tanggal 12 September 2023	Ya
17	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah	590/22 Juli 2023	2023	Habis Pada Tanggal 25 Juli 2026	Tidak
18	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah	590/42 01/09/2023	2023	Habis Pada Tanggal 18 September 2026	Ya
19	Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas sisa Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak	590/32 5 November 2024 (SISA TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK)	2024	Habis pada tanggal 5 November 2025	Ya
Pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya					
1	Perpanjangan Atas Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Waduk Pidekso Di Kabupaten Wonogiri	590/20 06/04/2020 (WADUK PIDEKSO)	2020	Habis pada tanggal 06/04/2021	Ya
2	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Slinga Kabupaten Purbalingga	590/21 06/04/2020 (IRIGASI SLINGA)	2020	Habis pada tanggal 06/04/2021	Tidak
3	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Randugunting Kabupaten Blora	590/35 6 Juli 2020 (BENDUNGAN RANDUGUNTING)	2020	Habis pada tanggal 6 Juli 2021	Ya
4	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo	590/539 5 Juni 2020 (BENDUNGAN BENER)	2020	Habis pada tanggal 5 Juni 2021	Ya
5	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang	590/46 01-Sep-20 BENDUNGAN JRAGUNG	2020	Habis pada tanggal 01-Sep-22	Ya
6	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar	590/11 15-Apr-21 (BENDUNGAN JLANTAH)	2021	Habis Pada Tanggal 15 April 2023	Ya
7	Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah	590/20 7 Juni 2021 (BENDUNGAN BENER)	2021	Habis Pada Tanggal 7 Juni 2023	Ya
8	Penetapan Lokasi Pengadatan Tanah Tahap II Bagi	590/22 22 Juli 2021 (PIDEKSO)	2021	Habis Pada Tanggal 22 Juli 2024	Ya

No	Nama Penetapan Lokasi	Nomor	Tahun	Keterangan	PSN
	Pembangunna Bendungan Pidekso Di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah				
9	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Slinga Lanjutan di Kabupaten Purbalingga	590/36 12-Nov-21 (D.I. SLINGA LANJUTAN)	2021	Habis Pada Tanggal 12 November 2024	Ya
10	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang	590/31 1 September 2022	2022	Habis Pada Tanggal 1 September 2023	Ya
11	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri	590/43 20 Oktober 2022	2022	Habis Pada Tanggal 20 Oktober 2025	Ya
12	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar	590/44 20 Oktober 2022	2022	Habis Pada Tanggal 20 Oktober 2025	Ya
13	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora	590/52 28 November 2022	2022	Habis Pada Tanggal 28 November 2025	Ya
14	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Tingal di Kabupaten Temanggung	590/55 15 Desember 2022	2022	Habis Pada Tanggal 15 Desember 2025	Tidak
15	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas tanah Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupatem Wonosobo Provinsi jawa Tengah	590/19 7 Juni 2023	2023	Habis Pada Tanggal 7 Juni 2026	Ya
16	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora	590/23 Juli 2023	2023	Habis Pada Tanggal 28 Juli 2026	Tidak
17	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Daerah Irigasi Slinga Tahap II di Kabupaten Purbalingga	590/26 Agustus 2023	2023	Habis Pada Tanggal 21 Agustus 2026	Ya
18	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang	590/43 01/09/2023	2023	Habis Pada Tanggal 18 September 2026	Ya
19	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora	590/2 31 Januari 2024 (BENDUNGAN KARANGNONGKO KAB BLORA)	2024	Habis pada tanggal 31 Januari 2027	Ya

No	Nama Penetapan Lokasi	Nomor	Tahun	Keterangan	PSN
20	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bodri di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung	590/24 19 September 2024 (BENDUNGAN BODRI DI KAB KENDAL DAN KAB TEMANGGUNG)	2024	Habis pada tanggal 19 September 2027	Ya
21	Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Slinga Lanjutan di Kabupaten Purbalingga	590/33 12 november 2024 (JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI SLINGA LANJUTAN DI KAB PURBALINGGA)	2024	Habis pada tanggal 12 November 2025	Tidak
22	Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Kedunglanggar di Kabupaten Batang	590/47 20 Desember 2024 (BENDUNGAN KEDUNGLANGGAR DI KAB BATANG)	2024	Habis pada tanggal 20 Desember 2027	Tidak
Pembangunan pelabuhan, bandar udara, dan terminal					
1	Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Tambahan Lahan Bagi Pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solo Balapan-Bandara Adi Soemarmo Di Kabupaten Boyolali Dan Kota Surakarta	590/13 24 Februari 2020 (KAI BANDARA ADI SOEMARMO)	2020	Habis pada tanggal 24 Februari 2022	Ya
Pembangunan pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik					
1	Pembaharuan Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kV (Ungaran – Pedan) – Mandirancan di Kabupaten Pemalang.	590/6 8 Januari 2020 (SUTET)	2020	Habis Pada Tanggal 8 Januari 2022	Ya
2	Pembaharuan Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kV (Ungaran – Pedan) – Mandirancan di Kota Semarang.	590/2 7 Januari 2020 (SUTET)	2020	Habis Pada Tanggal 7 Januari 2022	Ya
3	Pembaharuan Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kV (Ungaran – Pedan) – Mandirancan di Kabupaten Semarang.	590/2 8 Januari 2020 (SUTET)	2020	Habis Pada Tanggal 8 Januari 2022	Ya
4	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Ampel di Provinsi Jawa Tengah	590/55 12 Oktober 2020 (GITET AMPEL)	2020	Habis pada tanggal 12 Oktober 2022	Ya
5	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	590/33 7 September 2022	2022	Habis Pada Tanggal 7 September 2025	Ya

No	Nama Penetapan Lokasi	Nomor	Tahun	Keterangan	PSN
	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 Section 2 (Ampel – Pedan) Di Provinsi Jawa Tengah				
6	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 Section 1 (Ungaran-Ampel) di Provinsi Jawa Tengah	590/13 30 Maret 2023	2023	Habis Pada Tanggal 20 April 2025	Ya
7	Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 Section 2 (Ampel-Pedan) di Provinsi Jawa Tengah	590/22 5 September 2024 (SUTET 500kV UNGARAN-PEDAN SIRKUIT 2 SECTION 2 (AMPEL-PEDAN) DI PROVINSI JAWA TENGAH)	2024	Habis pada tanggal 5 September 2025	Ya
8	Pengadaan Tanah Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV Pedan-Solo Baru di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo	590/34.1 21 November 2024 (SUTT 150kV PEDAN-SOLO BARU DI KAB KLATEN DAN KAB SUKOHARJO)	2024	Habis pada tanggal 21 November 2027	Tidak
Pembangunan tempat pembuangan dan pengolahan sampah					
1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Magelang	590/45 20 Oktober 2022	2022	Habis Pada Tanggal 20 Oktober 2025	Tidak
Pembangunan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik					
1	Pembaharuan Penetapan Lokasi Lahan Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV Cilacap di Kabupaten Cilacap	590/7 15 Januari 2020 (Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV Cilacap)	2020	Habis Pada Tanggal 15 Januari 2022	Ya
2	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Untuk Kebutuhan Tambahan Lahan Pembangunan REFINERY DEVELOPMENT MASTER PLAN (RDMP) REFINERY UNIT (RU) IV Cilacap di Kabupaten Cilacap	590/05 31 Maret 2021 (RDMP RU CILACAP)	2021	Habis Pada Tanggal 31 Maret 2023	Ya
3	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kampus Politeknik Maritim Negeri Indonesia (POLIMARIN) di Kabupaten Semarang	590/21 30 Juni 2021 (POLIMARIN)	2021	Habis Pada Tanggal 30 Juni 2024	Ya
4	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Kawasan Industri Cilacap Di Kabupaten Cilacap	590/25 5 Agustus 2022	2022	Habis Pada Tanggal 5 Agustus 2025	Ya

Sumber: Bidang Pertanahan, Dinas PERAKIM Prov. Jateng Tahun 2020-2024, Diolah 2024

Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 55 permohonan dengan jumlah bidang sebanyak 24.041 bidang tanah dan luasan sebanyak 3.447,1 Ha.

Selain itu, pada urusan Pertanahan juga dilaksanakan fasilitasi permasalahan pertanahan yang bertujuan untuk meminimalisir konflik pertanahan yang memerlukan penanganan masing-masing pihak baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan demi terciptanya tertib administrasi pertanahan. Fasilitasi permasalahan pertanahan dilaksanakan berdasarkan pada surat permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah yang kemudian di teruskan ke Disperakim. Fasilitasi permasalahan pertanahan yang dilakukan oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah s.d. Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18.
Fasilitasi Permasalahan Pertanahan s.d. Tahun 2024
di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	Acara	Lokasi	Tahun
1	Kabupaten Banjarnegara	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bummi Unit 2 di Kabupaten Banjarnegara	Balai Kantor Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara	2021
2	Kabupaten Klaten	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Listrik Aliran Atas (LAA) Emplastmen Klaten Kabupaten Klaten	Balai RW 005 Kp. Sekalekan Kelurahan Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten	2021
3	Kota Surakarta	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Jalur Ganda Kereta Api Solo-Semarang Fase 1 (Solo Balapan-Kadipiro) Kota Surakarta	Kelurahan Joglo, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Banjarsari	2021
4	Kabupaten Blora	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Fasilitasi Penanganan Aduan Sdr. Wiwit Kurniawan Terkait Pemblokiran Sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora	Kabupaten Blora	2021
5	Kabupaten Klaten	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Rapat Pembahasan Penetapan Hak Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah Umbul Ingas Kepada Pemerintah Desa Cokro Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Ruang Rapat Asisten Sekda Lt. 4 Kantor Gubernur Jawa Tengah	2021

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	Acara	Lokasi	Tahun
6	Kota Surakarta	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Fasilitasi Aduan Atas Tanah Bersertifikat HGB yang Terdampak Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Jalur Ganda Kereta Api Solo-Semarang Fase 1 (Solo Balapan-Kadipiro) Kota Surakarta	Kota Samarang dan Kota Surakarta	2021
7	Kabupatn Demak	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Fasilitasi Pertemuan Lintas Sektoral dalam pengukuran tanah Program PTSL di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten demak terhadap 2 (dua) blok bidang tanah yang belum di ukur	Kantor Disperakim Prov. Jawa Tengah dan Kantor Desa Sumberejo dan lokasi PTSL	2021
8	Kota Semarang	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Tawang- Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang	Kota Semarang	2022
9	Kota Semarang	Mediasi dan Fasilitasi Permasalahan ganti rugi pada Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Permohonan agar bentuk santunan Madrasah bukan hanya dalam bentuk (uang santunan)	Kota Semarang	2022
10	Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	Permasalahan obyek tanah Makam Daksinoloyo	Kabupaten Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo	2022
11	Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	Permasalahan obyek tanah Makam Pracimaloyo	Kabupaten Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo	2022
12	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	Permasalahan Pertanahan Tanah HM No. 2472 a.n Bambang Mulyo Utomo yang secara administrasi terletak di wilayah Kabupaten Karanganyar namun sertifikat dan izin pemanfaatan ruangnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen	2022
13	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	Permasalahan Pertanahan Tanah HM No. 03671 atas nama Sukir yang secara administrasi terletak di wilayah Kabupaten Karanganyar namun sertifikat dan izin pemanfaatan ruangnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen	2022
14	Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	Permasalahan pertanahan obyek Umbul yang terletak diwilayah perbatasan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali	2022

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	Acara	Lokasi	Tahun
15	Kota Semarang	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Tawang- Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang	Kota Semarang	2022
16	Kota Semarang	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Tawang- Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II	Kota Semarang	2023
17	Kab. Semarang	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Penyelesaian Permasalahan terkait keberadaan menara Telekomunikasi di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang (Aduan Sdr. Lismanto)	Kab. Semarang	2023
18	Semarang & Demak	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung)	Semarang & Demak	2023
19	Cilacap	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Penanganan Permohonan Penataan Stasiun Maos Kabupaten Cilacap	Maos, Cilacap	2023
20	Kota Semarang	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Fasilitasi aduan Sartono dengan Ahli Waris Surohadi Sukardi terkait penetapan penerimaan atas ganti kerugian pada pembangunan tanggul laut di Tambak Lorok, Kel. Tanjung Mas	Kota Semarang	2024
21	Semarang & Demak	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Fasilitasi aduan sengketa bidang tanah ahli waris Bp Said dan Ibu Jumirah dan Sartono pada Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak	Semarang & Demak	2024
22	Semarang & Demak	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penyelesaian kendala pembayaran dana kerohiman objek bidang tanah pada Pembangunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Jalan Tol Semarang - Demak	Semarang & Demak	2024
23	Semarang & Demak	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penyelesaian pembayaran dana kerohiman kepada para pemilik tanah yang menjadi objek PDSK Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Tahap III dan Tahap IV	Semarang & Demak	2024
24	Semarang & Demak	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dlm Rangka Pembangunan Nasional	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Jalan Tol Kaligawe – Sayung Seksi 1 Tahap 2	Semarang & Demak	2024

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	Acara	Lokasi	Tahun
		Untuk Kepentingan Umum			
25	Kab Kendal	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	Penyelesaian pengajuan keberatan atas Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV KEK Kendal Incomer (Kaliwungu – Weleri) di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Kecamatan Brangsong Kab. Kendal oleh PT. PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Tengah/UPP JBT 4 Semarang	Kab. Kendal	2024
26	Kab. Demak	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Mediasi permasalahan TKD Desa Kedung Malang Kab. Jepara yang saat ini dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Desa Kedungmutih Kab. Demak	Kab. Demak	2024
27	Kab. Pati	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Mediasi upaya penyelesaian permasalahan Pulau Seprapat di Kabupaten Pati	Kab. Pati	2024
28	Kab. Purbalingga	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Mediasi permohonan penjelasan pelaksanaan Konsolidasi Tanah oleh Kepala Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kab Purbalingga	Kab. Purbalingga	2024
29	Kab. Cilacap	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penyelesaian pembayaran dana kerohiman kepada para pemilik tanah yang menjadi objek PDSK untuk Pembangunan Duplikasi Jembatan Tipar di Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	2024
30	Semarang & Demak	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penyelesaian pembayaran dana kerohiman kepada para pemilik tanah yang menjadi objek PDSK melalui mekanisme Konsinyasi	Semarang & Demak	2024

Sumber : Bidang Pertanahan Dinas PERAKIM Provinsi Jawa Tengah, 2024 Diolah

Dan, dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanahan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/39 Tahun 2024 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat Provinsi. Reforma agraria yang dilaksanakan oleh DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah terkait dengan penataan akses. Disperakim Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 – 2024 telah menyelenggarakan penataan akses reforma agraria melalui pemberdayaan masyarakat sebanyak 33 penataan akses dengan jumlah intervensi 1567 KK. Penataan akses tersebut dilaksanakan berbasis klaster dalam rangka

meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah serta mendorong inovasi kewirausahaan subjek RA sebagai berikut :

Tabel 2.19.
Penataan Akses Reforma Agraria s.d. Tahun 2024
di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Bentuk Penataan Akses	Jumlah (KK)	Tahun
1	Wonosobo	Garung	Kayugiyang	Pelatihan Penyediaan Benih Kentang	107 KK	2019
2	Boyolali	Sawit	Kateguhan	Pelatihan Pemanfaatan Burung Hantu (Tyto Alba) Sebagai Pengendali Hama Tikus	50 KK	2020
3	Boyolali	Banyudono	Trayu	Pelatihan Pemanfaatan Burung Hantu (Tyto Alba) Sebagai Pengendali Hama Tikus	50 KK	2020
4	Rembang	Sedan	Bogorejo	Pelatihan "Pemanfaat Limbah Organik Menjadi Bahan Bioremediasi"	50 KK	2023
5	Klaten	Manisrenggo	Tihayan	Pelatihan "Terapan Pakan Alternatif Budidaya perikanan Air Tawar"	50 KK	2023
6	Sragen	Kalijambe	Bukuran	Pelatihan "Membatik Untuk Meningkatkan Daya Tarik Desa Wisata"	50 KK	2023
7	Banjarnegara	Purwanegara	Parakan	Pelatihan "Terapan Pakan Alternatif Budidaya perikanan Air Tawar"	50 KK	2023
8	Cilacap	Kroya	Ayamalas	Pelatihan "Alternatif Pembuatan Pakan Untuk Budidaya Ikan Air Tawar"	50 KK	2023
9	Purbalingga	Rembang	Panusupan	Pelatihan Pemanfaatn Limbah Sabut kelapa	50 KK	2023
10	Pemalang	Pemalang	Tambakrejo	Pelatihan "Pemanfaat Limbah Organik Menjadi Bahan Bioremediasi"	50 KK	2023
11	Wonosobo	Kertek	Sudungdewo	Pelatihan “Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Menjadi Produk Organik”	50 KK	2024
12	Banyumas	Kembaran	Pliken	Pelatihan “Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Menjadi Produk Organik”	50 KK	2024
13	Blora	Kunduran	Bakah	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	50 KK	2024
14	Karanganyar	Jatiyoso	Karangsari	Pelatihan Penanggulangan Hama Pada Tanaman Padi	50 KK	2024
15	Cilacap	Maos	Glempang	Pelatihan Pemanfaatan Sampah Sebagai Produk Sehari-hari	50 KK	2024

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Bentuk Penataan Akses	Jumlah (KK)	Tahun
16	Wonosobo	Mojo Tengah	Slukatan	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik Menjadi Bioaktivatir	50 KK	2024
17	Purbalingga	Rembang	Panusupan	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sabut Kelapa	50 KK	2024
18	Pemalang	Pemalang	Tambakrejo	Pelatihan Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga Menjadi Produk Organik	50 KK	2024

Sumber : Bidang Pertanahan Dinas PERAKIM Provinsi Jawa Tengah, 2024 Diolah

Tabel 2.20.
Realisasi Sertifikasi LP2B di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Sertifikat	Tahun
1	Magelang	Kec. Candi Mulyo	Desa Tampir Kulon	150	2018
2	Purworejo	Kec. Ngombol	Desa Wunut	73	2018
			Desa Sumberejo	79	2018
			Desa Tanjung	30	2018
			Desa Jombang	18	2018
3	Wonosobo	Kec. Garung	Desa Jengkol	77	2018
			Desa Lengkong	80	2018
			Desa Siwuran	46	2018
			Desa Kayugiyang	40	2018
			Desa Kuripan	57	2018
4	Kebumen	Kec. Karanggayam	Desa Karangmaja	30	2018
			Desa Kajoran	40	2018
			Desa Glontor	80	2018
5	Pekalongan	Kec. Doro	Desa Sidoarjo	200	2018
6	Brebes	Kec. Sirampog	Desa Kaliloka	150	2018
7	Demak	Kec. Wonosalam	Desa Kalianyar	128	2018
			Desa Karangrowo	72	2018
8	Jepara	Kec. Donorojo	Desa Blingoh	100	2018
9	Grobogan	Kec. Tegowanu	Desa Tegowanu Wetan	150	2018
10	Blora	Kec. Kunduran	Desa Bakah	200	2018
			Desa Sonokidul	100	2018
11	Boyolali	Kec. Sawit	Desa Kateguhan	49	2018
			Desa Cempaka Sawit	4	2018
			Desa Kemasan	20	2018
			Desa Jatirejo	27	2018
		Kec. Banyudono	Desa Trayu	28	2018
		Kec. Klego	Desa Banyuurip	22	2018
12	Karanganyar	Kec. Jatiyoso	Desa Karangsari	125	2018
		Kec. Ngargoyoso	Desa Jatirejo	70	2018
13	Banyumas	Kec. Kembaran	Desa Pliken	150	2018
14	Kendal	Kec. Cepiring	Desa Korowelanganyar	50	2018
15	Batang	Kec. Wonotunggal	Desa Brayoy	146	2018
16	Pati	Kec. Dukuhseti	Desa Grogol	75	2018
			Desa Kembang	75	2018
		Kec. Batangan	Desa Ngening	100	2018
17	Temanggung	Kec. Selopampang	Desa Gambasan	127	2018
18	Pemalang	Kec. Bantar Bolang	Desa Wanarata	210	2018
19	Tegal	Kec. Balapulang	Desa Balapulang Kulon	52	2018

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Sertifikat	Tahun
20	Purbalingga	Kec. Kalimanah	Desa Kedungwuluh	98	2018
21	Rembang	Kec. Sedan	Desa Bogorejo	90	2018
			Desa Menoro	175	2018
22	Sragen	Kec. Sambirejo	Desa Jetis	48	2018
23	Blora	Kec. Kunduran	Desa Sonokidul	100	2019
24	Pemalang	Kec. Pamotan	Pamotan	100	2020
25	Rembang	Kec. Petarukan	Kendalsari	100	2020
26	Blora	Kec. Kunduran	Bejirejo	150	2021
27	Wonosobo	Kec. Selomerto	Simbarejo	150	2021
28	Cilacap	Kec. Maos	Mernek	100	2021
29	Semarang	Kec. Bringin	Gogodalem	50	2022
30	Blora	Kec. Kunduran	Botoreco	50	2022
31	Cilacap	Kec. Sampang	Paberasan	50	2022
32	Wonosobo	Kec. Kertek	Sudungdewo	100	2023
		Kec. Mojotengah	Pungangan	100	2023
33	Blora	Kec. Banjarejo	Sumberagung	200	2023
34	Cilacap	Kec. Maos	Glempang	40	2023
			Kalijaran	70	2023
			Karangrena	110	2023
			Panisihan	30	2023

Sumber : Bidang Pertanahan Dinas PERAKIM Provinsi Jawa Tengah, 2024 Diolah

Kinerja pelayanan perangkat daerah terkait dengan anggaran pendanaan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, secara umum realisasinya masih dibawah anggaran yang ada. Pasca refokusing pada tahun 2020-2021, dimana terjadi deviasi antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya yang cukup besar, karena ketersediaan anggaran diprioritaskan dalam rangka penanganan dan pemulihan kondisi pasca pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan *refocusing* anggaran yang menyebabkan kebutuhan di urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan masih belum dapat terpenuhi sesuai dengan target yang dianggarkan.

Dilema terkait penganggaran kegiatan terulang kembali pada Tahun 2025 dengan diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dimana Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa akan dilakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ikut mengambil kebijakan untuk diterapkan pada OPD terkait. Hal tersebut membuat perubahan pada target dan rencana untuk menanggulangi masalah terkait perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka pencapaian target, perlu didukung oleh adanya anggaran yang mencukupi, konsistensi penganggaran, dan konsistensi kebijakan. Hambatan terbesar dari tidak tercapainya realisasi sesuai dengan target yang ditentukan adalah karena konsistensi penganggaran yang tidak menerus, kosistensi kebijakan terkait dengan pembagian kewenangan pemerintah daerah, besar anggaran yang tidak mencukupi dan kurangnya sinergi antar *stakeholders* yang terkait.

Tabel 2.21.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A Renstra PD Tahun 2018 - 2023																		
1	Indikator Tujuan :																-	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	%	84,24	85,91	87,6	89,28	-	85,49	90,82	94,31	94,84		101,48	105,72	107,66	106,23		Tercapai
	Persentase rumah layak huni dan terjangkau yang terpenuhi	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tercapai
	Indikator Sasaran :																-	
	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	%	5,95	15,35	26,51	34,16	-	11,24	39,96	58,54	67,70		188,91	260,33	220,82	191,69		Tercapai
	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tercapai
	Indikator Program :																-	
	1) Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	4,57	7,7	10,5	16,47	-	1,92	3,66	6,71	8,91		42,01	47,53	63,9	54,1		Tercapai
	2) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	10,35	19,31	28,28	37,24	-	7,06	9,44	11,86	12,6		68,21	48,89	41,94	33,83		Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Indikator Tujuan :											-					-	Tercapai
	Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	%	79,29	79,32	79,36	79,36	-	79,44	79,54	79,57	79,57		100,19	100,28	100,26	100,26		
	Indikator Sasaran :											-					-	Tercapai
	Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	%	71,03	63,97	56,9	49,83	-	38,22	21,05	15,75	7,92		185,85	303,9	361,27	361,27		
	Indikator Program :																	Tercapai
	1) Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	4,21	7,49	13,79	23,37		7,49	24,12	29,97	31,08		177,91	322,03	217,33	217,33		
	2) Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	-	-	17,5	20		-	0	27,5	27,5		0	0	157,14	157,14		Tercapai
	3) Persentase penanganan kawasan kumuh	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	4) Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100		Tercapai
	5) Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Indikator Tujuan :																	
	Persentase kepastian hukum atas bidang tanah	%	100	100	100	100		199,72	222,96	321,89	100		199,72	222,96	321,89	321,89		Tercapai
	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Difasilitasi	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitai	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	Indikator Sasaran :																	
	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	100	100	100		199,72	222,96	321,89	100		199,72	222,96	321,89	321,89		Tercapai
	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	Persentase pelaksanaan Reforma Agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	Indikator Program :																	
	1) Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	-	-	-		199,72	-	-	-		199,72	-	-	-		Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2) Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	-	100	100	100		-	222,96	596,81	100		-	222,96	596,81	596,81		Tercapai
	3) Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	%	-	100	100	100		-	-	134,15	100		-	-	134,15	134,15		Tercapai
	4) Persentase pelaksanaan reforma agraria	%	-	100	100	100		-	-	234,73	100		-	-	234,73	234,73		Tercapai
	5) Persentase fasilitasi penetapan lokasi	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	6) Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	7) Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
4	Indikator Tujuan :	Angka	100	100	75	75		83,75	84,75	84,5	82,45		83,75	84,75	112,67	112,67		Tercapai
	Nilai Kepuasan Masyarakat																	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka																
	Indikator Sasaran 1 :	Angka																
	1) Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka																

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	71,8	71,95	72,1	72,25		75,44	78,78	79,08	72,25		105,07	109,49	109,68	109,68		Tercapai
	3) Indeks Manajemen Resiko	Angka	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	Indikator Program :																	
	1) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100		67,32	100	-	-		67,32	100	-	-		Tercapai
	2) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100		Tercapai
	3) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah	%	100	100	100	100		100	-	100	100		100	100	100	100		Tercapai
	4) Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	-		-	-	-	-		100	100	100	100		Tercapai
B	Renstra PD Tahun 2024 - 2026																	
1	Indikator Tujuan :																	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tercapai
	Persentase rumah layak huni dan	%	-	-	-	-	72,67					73,79					101,54	Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	terjangkau yang terpenuhi																	
	Indikator Sasaran :																	
	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	%	-	-	-	-	29,69					31,76					106,97	Tercapai
	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat	%	-				20,14					20,33					100,94	Tercapai
	Indikator Program :																	
	1) Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	-	-	-	-	0,48					0,48					100	Tercapai
	2) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	-	-	-	-	4,2					4,2					100	Tercapai
2	Indikator Tujuan :																	
	Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	%	-	-	-	-	58,32					63,6					109,05	Tercapai
	Indikator Sasaran :																	
	Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	%	-	-	-	-	41,68					36,4					114,51	Tercapai
	Indikator Program :																	
	1) Persentase luasan kawasan	%	-	-	-	-											-	Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	permukiman kumuh yang tertangani																	
	2) Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	-	-	-	-											-	Tercapai
	3) Persentase penanganan kawasan kumuh	%					3,18					3,18					100	Tercapai
	4) Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	-	-	-	-	100					100					100	Tercapai
	5) Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%					100					100					100	Tercapai
3	Indikator Tujuan :																	
	Persentase kepastian hukum atas bidang tanah	%	-	-	-	-	-					-					-	Tercapai
	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Difasilitasi	%	-	-	-	-	100					100					100	Tercapai
	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%					100					100					100	Tercapai
	Indikator Sasaran :	%	-	-	-	-	-					-					-	Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum																	
	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	-	-	-	-	100					100					100	Tercapai
	Persentase pelaksanaan Reforma Agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria	%					100					100					100	Tercapai
	Indikator Program :																	
	1) Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	-	-	-	-	-					-					-	Tercapai
	2) Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	-	-	-	-	-					-					-	Tercapai
	3) Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	%					-					-					-	Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	4) Persentase pelaksanaan reforma agraria	%	-	-	-	-	-					-					-	Tercapai
	5) Persentase fasilitasi penetapan lokasi	%					100					100					100	Tercapai
	6) Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	-	-	-	-	100					100					100	Tercapai
	7) Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	%					100					100					100	Tercapai
4	Indikator Tujuan :	Angka	-	-	-	-	-										-	Tercapai
	Nilai Kepuasan Masyarakat																	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	-	-	-	-	76					76					100	Tercapai
	Indikator Sasaran 1 :	Angka	-	-	-	-	82					82					100	Tercapai
	1) Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka																
	2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka					-					-					-	Tercapai
	3) Indeks Manajemen Resiko	Angka	-	-	-	-	2,45					2,45					100	Tercapai
	Indikator Program :	%	-	-	-	-	100					119,5					119,5	Tercapai
	1) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan																	

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	keuangan perangkat daerah																	
	2) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%					-					-					-	Tercapai
	3) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah	%	-	-	-	-	-					-					-	Tercapai
	4) Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%					100					108,08					108,08	Tercapai

Sumber : Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Tabel 2.22.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun						APBD pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun/ Sampai dengan Tahun (Rp. 000)						Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)						Rata – rata Pertumbuhan	
	(Rp. 000)						(Rp. 000)																			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pembangunan Perumahan	6.510.000	15.750.000	-	-	-	-	6.510.000	13.886.258	-	-	-	-	6.124.227	11.154.102	-	-	-	-	94,07	80,32					184.406.450	125.746.875
Pengembangan Perumahan	-	-	12.989.600	17.425.000	18.580.000	39.765.000	-	-	11.474.465	19.825.000	53.541.301.000	34.601.321.000	-	-	11.347.803	19.763.534	53.208.885.236	34.585.018.844			98,90	99,69	99,38	99,95	208.763.375	210.393.275
Penanganan Kawasan Permukiman	5.165.000	5.681.500	-	-	-	-	5.165.000	739.557	-	-	-	-	4.460.281	670.117	-	-	-	-	86,36	90,61					- 110.636.075	- 94.754.100
Urusan Penyelenggara an PSU Permukiman	-	-	4.193.500	3.300.000	3.300.000	-	-	-	3.042.381	3.300.000	-	-	-	-	3.042.140	3.208.951	-	-			99,99	97,24			6.440.475	4.170.275
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-	-	-	-	-	1.565.000	-	-	-	-	1.022.117.000	1.575.411.000	-	-	-	-	988.524.071	1.574.591.294					96,71	99,95		
Program Kawasan Permukiman	-	-	-	610.000	655.000	5.525.000	-	-	-	610.000	3.847.462.000	3.511.475.000	-	-	-	599.919	3.806.798.086	3.505.450.557				98,35	98,94	99,83		14.997.975
Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.895.000	2.235.000	-	-	-	-	1.895.000	1.094.598	-	-	-	-	1.808.041	1.084.571	-	-	-	-	95,41	99,08					- 20.010.050	- 18.086.750
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	2.085.000	1.200.000	1.344.000	285.000	-	-	1.253.672	1.500.000	1.192.592.000	215.000.000	-	-	1.251.285	1.482.223	1.192.402.518	214.999.238			99,81	98,81	99,98	100,00	6.158.200	5.773.450
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	351.515.000	2.550.000	-	-	-	-	1.865.000	1.171.827	-	-			1.837.250	1.153.003	-	-			98,51	98,39					- 17.329.325	- 17.106.175
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-	-	595.000	550.000	575.000	450.000	-	-	343.336	550.000	380.000.000	399.289.000	-	-	343.336	549.915	379.545.600	398.683.784			100,00	99,98	99,88	99,85	5.166.600	5.164.475
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-	-	589.500	500.000	540.000	830.000	-	-	276.154	500.000	677.000.000	600.000.000	-	-	276.154	499.996	676.804.600	598.806.284			100,00	100,00	99,97	99,80	5.596.150	5.596.050
Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan	-	-	572.500	500.000	545.000	690.000	-	-	249.360	500.000	569.344.000	590.000.000	-	-	249.360	496.883	569.056.300	588.834.392			100,00	99,38	99,95	99,80	6.266.000	6.188.075

Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun						APBD pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun/ Sampai dengan Tahun (Rp. 000)						Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)						Rata – rata Pertumbuhan	
	(Rp. 000)						(Rp. 000)																			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Maksimum dan Tanah Absentee																										
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	5.320.000	7.815.000	-	-	-	-	5.845.000	4.898.556	-	-	-	-	5.115.912	4.298.429	-	-	-	-	87,53	87,75					- 23.661.100	- 20.437.075
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.100.000	-	-	-	-	720.000	520.977	-	-	-	-	647.482	513.167	-	-	-	-	89,93	98,50					- 4.975.575	- 3.357.875
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.778.752	21.915.000	22.461.000	21.800.000	-	-	14.518.567	17.753.221	19.717.024.000	21.882.584.000	-	-	14.298.745	17.414.231	19.142.994.708	20.900.571.316			98,49	98,09	97,09	95,51	80.866.350	77.887.150

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat kondisi kinerja pelayanan perangkat daerah terkait dengan anggaran pendanaan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, secara umum alokasi anggaran dan realisasinya tidak berbeda jauh dengan anggaran dan realisasi yang tercantun dalam dokumen Renstra sebelumnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran pada berbagai program menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari total anggaran yang mencapai sekitar Rp 98,58 triliun, telah terealisasi sebesar Rp 96,55 triliun atau sekitar 98,03%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas program telah mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi yang direncanakan. Beberapa program bahkan mencatat tingkat realisasi yang hampir sempurna, seperti Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian, Penyelesaian Sengketa Tanah, serta Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan realisasi di atas 99%. Namun demikian, masih ada beberapa program yang tingkat realisasinya di bawah 90%, seperti Pembangunan Perumahan, Penanganan Kawasan Permukiman, dan Manajemen Administrasi Perangkat Daerah. Program-program ini perlu mendapatkan perhatian lebih agar pelaksanaannya ke depan dapat lebih optimal. Secara umum, capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang cukup efisien dan efektif dalam mendukung program-program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 2.23.

Capaian Kinerja dan Realisasi Pendanaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
		Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Anggaran Rp. (000)	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Anggaran Rp. (000)	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Anggaran Rp. (000)	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Anggaran Rp. (000)	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Anggaran Rp. (000)	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	105	105	3.127.242	141	141	3.654.072	70	70	4.621.000	468	468	12.521.796.257	210	210	34.585.018.844	Tercapai
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	11	11		186	186	7.137.696	326	326	15.204.000	287	287	12.078.708.609	253	253		Tercapai

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah juga dapat dilihat dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat yang dilaksanakan melalui 4 kegiatan yang mendukung , yaitu :

- 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
- 2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
- 3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
- 4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

Selain SPM, kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga mendukung capaian kinerja indikator SDGs Tujuan 11. yaitu Kota dan Permukiman Berkelanjutan dengan indikator proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Dari tahun ke tahun, capaian tersebut juga semakin meningkat. Pada tahun 2024, data asumsi jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data BPS yaitu sebanyak 9.261.697 unit dan 71,76% diantaranya telah memiliki akses hunian layak. Secara rinci, capaian indikator SDGs Tujuan 11. yaitu proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.24.
Capaian Kinerja Indikator TPB/ SDGs Bidang Perumahan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS	%	67,93	66,47	67,02	68,85	71,76
			Rumah Tangga	5.818.483	5.771.336	5.847.609	6.029.999	6.646.194

Sumber : Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG's) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Strategi optimalisasi capaian rumah layak huni di Jawa Tengah dilakukan dengan strategi :

1. Penanganan *backlog* kelayakan melalui peningkatan kualitas RTLH bagi masyarakat miskin, serta pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
2. Penanganan *backlog* kepemilikan melalui pembangunan rumah sederhana sehat bagi masyarakat miskin dan pembangunan rumah akibat relokasi program pemerintah.

Upaya tersebut diatas juga terintegrasi dengan penanganan kawasan permukimannya dan prasarana dan sarana utilitasnya (PSU). Selain itu juga mengintegrasikan program – program yang inline mulai dari level kabupaten/kota sampai dengan level pusat, serta melibatkan kemitraan dari berbagai stakeholder. Sehingga intervensi anggaran berasal dari berbagai macam sumber pembiayaan mulai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, CSR, Swasta, Masyarakat dan Baznas.

2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut merupakan permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan yang dimaksud merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah. Permasalahan yang teridentifikasi diharapkan dapat menjawab strategi, arah kebijakan, dan kinerja yang akan diwujudkan pada bab berikutnya. Identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan tabel berikut.

Tabel 2.25.
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, dan pengelolaan pertanahan di Jawa Tengah belum optimal dalam menjawab tantangan pertumbuhan kota, keterbatasan lahan, tata kelola lintas sektor, serta kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.	1. Tingginya tekanan urbanisasi dan keterbatasan lahan belum diimbangi dengan penyediaan hunian layak yang merata dan berkelanjutan. 2. Kebijakan dan perizinan tata ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum sepenuhnya mendukung percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 3. Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman masih belum terintegrasi secara efektif. 4. Struktur kelembagaan daerah yang menangani perumahan dan permukiman belum merata dan belum seluruhnya sesuai dengan kompleksitas kebutuhan. 5. Pengelolaan urusan pertanahan masih tersebar di beberapa instansi dan belum seluruhnya terintegrasi dengan urusan permukiman dan pengembangan wilayah.	1. Belum optimalnya pemanfaatan dan perencanaan ruang (lahan) yang adaptif terhadap pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hunian. 2. Lemahnya harmonisasi antara kebijakan pusat (Renstra K/L) dan daerah (Renstra PD), terutama dalam hal pengaturan perumahan, permukiman, dan pertanahan. 3. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman. 4. Kurangnya regulasi yang mendorong percepatan reformasi struktural kelembagaan di daerah untuk menangani urusan perumahan dan pertanahan secara terintegrasi. 5. Masih terbatasnya mekanisme koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembangunan perumahan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum. 6. Ketidadaan sistem data spasial yang terintegrasi antara sektor pertanahan, perumahan, dan tata ruang.

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Membangun Indonesia Emas (IE) 2045 merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia, yang tercerminkan ke dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Oleh karenanya, harus dilandasi dengan pemikiran bahwa visi bernegara Indonesia selaras dengan amanat Pembukaan UUD 1945 (sebagai acuan utama) yaitu **Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur**. Secara garis besar, Visi Indonesia Emas 2045 tercerminkan dalam lima sasaran utama (visi), yaitu :

- 1. Pendapatan per kapita setara negara maju,
- 2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang,
- 3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat,
- 4. Daya saing sumber daya manusia meningkat, dan
- 5. Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas Tahun 2045, ditetapkan 8 agenda (misi), 17 tujuan (arah) dan 45 Indikator Utama Pembangunan, sebagaimana dalam lingkup bidang perumahan dan kawasan permukiman (PKP), teramanatkan dalam 4 sektoral yaitu **perumahan, air minum, sanitasi dan persampahan** :

Transformasi Indonesia	1. Transformasi Sosial Untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing
	2. Transformasi Ekonomi Untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industry manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru, dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestic dan global, serta Pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
	3. Transformasi Tata Kelola Membangun regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif
Landasan Transformasi	4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia Dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di Tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan
	5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi Dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, Pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam Pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam
Kerangka Implementasi Transformasi	6. Pembangunan kewilayahan Untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan Pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata Kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah
	7. Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan ramah Lingkungan Menjadi factor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi

8. Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas

Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan Pembangunan.

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

Secara garis besar, upaya-upaya transformasi dan substansi sektor perumahan dan kawasan permukiman dilandasi atas isu-isu strategis nasional, meliputi :

- 1. Program/kegiatan oleh pemerintah belum melayani seluruh segmentasi masyarakat, terutama bagi MBR dan pekerja sektor informal;
- 2. Kurangnya pengawasan dalam menjamin keandalan bangunan dan/atau kesesuaian terhadap tata ruang;
- 3. Belum optimalnya integrasi penyediaan perumahan dengan sarana dan prasarana, khususnya pada aera perkotaan.
- 4. Pasar pembiayaan primer dan sekunder perumahan yang belum mapan;
- 5. Manajemen dan pemanfaatan lahan perumahan belum efektif, terutama pada ketersediaan lahan, urban sprawl dan keamanan bermukim;
- 6. Pencegahan dan pengentasan kumuh belum dilakukan secara terpadu;
- 7. Terbatasnya kewenangan pemerintah daerah, khususnya rumah MBR.

Berlandaskan pada isu-isu strategis sektor perumahan, air minum, persampahan dan sanitasi, upaya-upaya yang teramanatkan dalam RPJP Nasional serta capaian-capaian sektoral pada periode sebelumnya, dapat dirumuskan kembali target Indonesia Emas 2045 lingkup bidang perumahan dan kawasan permukiman, sebagaimana berikut :

Tabel 2.26. Target Indonesia Emas 2045 di Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman

Arah (Tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan		
	b.) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100

Sumber : RPJPN 2025-2045

Selaras dengan baseline dan target yang ditetapkan pada Indonesia Emas 2045, terumuskan strategi-strategi penyediaan perumahan dan permukiman dalam setiap agenda pembangunannya, yaitu pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan difokuskan terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan rasio pembiayaan perumahan terhadap PDB dan mendorong pertumbuhan perekonomian, melalui :

- 1. Penyediaan perumahan layak dan terjangkau di Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Strategis lain, khususnya untuk pekerja;
- 2. Optimalisasi rantai nilai penyediaan perumahan;
- 3. Penguatan Pasar Pembiayaan Primer dan Sekunder Perumahan;
- 4. Kemudahan Perizinan dalam Proses Penyediaan Perumahan; dan

5. Pemanfaatan dana murah perbankan dan pengelolaan dana perumahan jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan PKP di Jawa Tengah yang memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerahnya, mendorong kebutuhan untuk merumuskan sebuah parameter dan penanganan yang berbeda-beda antara satu tipologi dengan tipologi lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif-alternatif strategi dan kebijakan yang dinilai lebih detail dan tepat dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran baik untuk jangka panjang jangka menengah maupun di tiap tahunnya. Perkembangan saat ini, permasalahan PKP tidak lagi dipandang sebagai sebuah permasalahan fungsional dan fisik saja, namun dipandang secara lebih luas dan kompleks yang mana memiliki keterkaitan lebih mendalam terhadap dimensi-dimensi kehidupan bermasyarakat, baik dalam sudut pandang aspek sosial, ekonomi, budaya, teknologi, ekologi maupun dalam sudut pandang politik. Oleh karenanya, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dan menengah di bidang PKP pada Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan kajian-kajian yang sifatnya menyeluruh. Sebagaimana salah satu dari alat analisis yang dapat digunakan adalah analisis SWOT. Pemilihan pemanfaatan analisis ini, didasari atas pertimbangan dalam melakukan pengukuran kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat dalam proses penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dalam prosesnya, akan menentukan prioritas kebijakan dan strategi yang selaras dengan karakteristik dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah.

Penerapan analisa SWOT dalam merumuskan arahan kebijakan dan strategis di bidang perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mengidentifikasikan unsur yang dinilai menjadi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) yang berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah secara internal kelembagaan. Selain itu, dalam prosesnya turut mempertimbangkan Peluang (*Opportunity*) dan Tantangan (*Threat*) dari luar kelembagaan atau yang sedang menjadi trend pada sektor perumahan. Tabel SWOT untuk menyusun strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.27.
Analisa SWOT Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah

SWOT	Penjabaran SWOT
Strenght (Kekuatan)	• Sistem Informasi Pendataan Perumahan (SIMPERUM) • PKS (kemitraan) PTN/S, BPR/BKK, Pokmas, dan lainnya • Program “Tuku lemah Oleh Omah” • Program “OPTIMIS” • Sistem Informasi Kawasan Permukiman • Penyediaan PSU Permukiman dan Hari Habitat • Gugus Tugas Reforma Agraria • Tim Persiapan Pengadaan Tanah di Prov. Jateng • Pelaksanaan SRP2 • Pokja PKP dan Forum PKP

SWOT	Penjabaran SWOT
Weakness (Kelemahan)	• Updating dan/atau akurasi data calon penerima bantuan • Rasio anggaran terhadap data eksisting permasalahan PKP • Kuantitas dan Kualitas SDM terbatas • Implementasi peran pengawasan dan pengendalian PKP • Implementasi peran Pokja PKP dan Forum PKP • Implementasi kemitraan dalam penyelesaian permasalahan PKP • Peran pemerintah daerah Provinsi untuk mengintervensi permasalahan PKP di daerah yang terbatas oleh regulasi • Penyelenggaraan penataan akses reforma agraria belum optimal di tingkat Kabupaten/Kota
Opportunity (Peluang)	• Sinergitas kebijakan, strategi, metadata, program dan kegiatan secara vertical dan/atau horizontal • PSN yang terdapat di dan/atau melintasi wilayah Jawa Tengah • Program Pembangunan 3 Juta Rumah, 1 Juta Rumah di Perkotaan, 2 Juta Rumah di Perdesaan • Program BSPS, IGAHP, dan pembiayaan perumahan lainnya • Hunian Berimbang • Kolaborasi penyelesaian PKP di Provinsi Jawa Tengah dalam berbagai sektor dan aspek • Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia yang heterogen. • Terapan Rekayasa Teknologi bidang PKP • Penetapan KRB oleh BPBD
Threats (Tantangan)	• Keterbatasan Lahan • Inflasi harga lahan, material dan/atau lainnya • Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat terhadap mekanisme dan standar teknis Pembangunan rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan dengan lingkungan yang sehat • Tingkat kesejahteraan (perekonomian) masyarakat • Komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar sectoral (vertical/horizontal) yang rendah • Budaya “hunian” Masyarakat • Standar dan mekanisme “pemberian bantuan” terhadap kebijakan penyaluran bantuan dari pemerintah • Komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pertanahan dan Reforma Agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

Analisis SWOT tersebut menjadi dasar dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus utama dalam perencanaan ke depan. Analisis SWOT memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi organisasi saat ini, baik dari faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil analisis tersebut, isu strategis dirumuskan sebagai titik-titik krusial yang muncul dari interaksi antar faktor SWOT dan memerlukan perhatian serta penanganan khusus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2.28.
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan rumah di kawasan rentan bencana	Permukiman tumbuh di wilayah pesisir (rawan banjir dan rob)	Daya dukung lingkungan rendah	Kenaikan muka laut akibat perubahan iklim dan pemanasan global	Urbanisasi pesisir memperparah rob	Penurunan muka tanah di Pekalongan, Demak, dan Semarang	Rehabilitasi/ penyediaan rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah Provinsi
Penurunan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman	Tumbuh dan berkembang nya kawasan kumuh	Daya dukung lingkungan rendah	Urbanisasi yang cepat menambah beban pada infrastruktur dan menciptakan ketimpangan dalam akses layanan dasar	Urbanisasi cepat tanpa kontrol tata ruang yang memadai	Permukiman kumuh di pinggiran kota, bantaran sungai, hingga wilayah pesisir	Pengentasan kawasan kumuh dan pencegahan tumbuh berkembang nya kawasan kumuh
Pengelolaan sanitasi dan air limbah	Penyediaan PSU Permukiman yang kurang memadai	Pencemaran air oleh <i>grey water</i> domestik	Akses sanitasi layak sebagai SDGs global	Keterbatasan sistem SPALD dan sarana pengolahan limbah	Wilayah pesisir alami penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan	Peningkatan kualitas PSU guna mendukung kawasan permukiman yang adaptif, berbasis lingkungan dan berkelanjutan
Pengendalian pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman	Tingginya kebutuhan <i>backlog</i> kepemilikan dan pertumbuhan <i>backlog</i> kelayakan	Degradasi kawasan lindung dan RTH	Tekanan terhadap ruang urban di negara berkembang	Alih fungsi lahan pertanian ke perumahan tidak terkendali	Kota dengan dominasi lahan terbangun hingga 58%	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan penyediaan/ pembangunan baru rumah layak huni, serta peningkatan tata kelola agraria
Ketahanan permukiman terhadap bencana	Kawasan permukiman berada di kawasan	Keterpaparan tinggi terhadap bencana	Risiko bencana akibat intensitas	Kawasan permukiman berada di zona risiko	Data wilayah dengan paparan	Rehabilitasi/ penyediaan rumah korban

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	rawan bencana		cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi	tinggi (banjir, likuefaksi, longsor)	tinggi bencana (Demak, Pekalongan)	bencana dan relokasi program pemerintah Provinsi

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan. Cara merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

a. Tujuan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan *ultimate outcome* secara spesifik dan terukur untuk menangani isu strategis yang menggambarkan fungsi layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan perangkat daerah yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni :

1. Meningkatkan kualitas permukiman dan agraria bagi masyarakat; dan
2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis.

b. Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan perangkat daerah diatas, kemudian diturunkan dalam rumusan sasaran perangkat daerah yang merupakan kondisi hasil yang diharapkan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sasaran dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani dan profil layanan tiap perangkat daerah. Indikator kinerja sasaran yang akan dicapai merupakan *intermediate outcome* atau *outcome* jangka menengah. Sasaran perangkat daerah yang akan dicapai sebagai penjabaran tujuan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, yakni :

1. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni;
 - Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat; dan
 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat;
2. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman;
 - Penurunan luasan kawasan kumuh;
3. Terlaksananya Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
4. Terlaksananya Reforma Agraria di Jawa Tengah;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.

Lebih lanjut, tujuan dan sasaran serta indikator dan target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, dapat diuraikan melalui tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Sat	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Kualitas Permukiman dan Agraria bagi Masyarakat												
			Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan	%	0	63,60	60,58	62,66	64,73	66,81	68,88	70,96	70,96
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	68,85	71,76	72,99	74,54	76,08	77,63	79,18	80,72	80,72
			Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi*)	%	0	100	100	55,50	58,30	61,10	63,80	66,60	66,60
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman											
			Persentase Kawasan Kumuh*)	%	0	36,40	39,42	37,34	35,27	33,19	31,12	29,04	29,04
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni											
			Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni*)	%	0	31,76	4,94	9,88	14,82	19,76	24,70	29,64	29,64

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Sat	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat ^{*)}	%	0	20,33	20,39	9,65	14,48	19,30	24,13	28,95	28,95
		Terlaksananya Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum											
			Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100
		Terlaksananya Reforma Agraria di Jawa Tengah											
			Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria oleh GTRA ^{*)}	%	0	100	100	22,20	27,70	33,30	38,80	44,40	44,40
2	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis												
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Angka	0	78	78	79	80	81	82	83	83
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas											

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Sat	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Angka	84,30	90,50	91,50	91,60	91,70	91,80	91,90	92,00	92,00
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman											
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Angka	0	3,03	3,04	3,06	3,08	3,1	3,12	3,14	3,14

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

- *) Keterangan :
- Perhitungan target capaian pada Tahun 2025-2029 mengalami perubahan *baseline*
 - Terdapat indikator baru untuk Tahun 2025-2029 sehingga beberapa kondisi awal kinerja pada Tahun 2023-2024 pada indikator tersebut tidak terisi.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan serangkaian tahapan atau langkah yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai. Sementara itu, kebijakan berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih fokus dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan dirancang untuk menjembatani strategi dengan sasaran secara lebih operasional, sehingga strategi yang disusun menjadi lebih spesifik, terfokus, konkret, dan dapat diterapkan. Selain itu, kebijakan berperan dalam mengarahkan pemilihan kegiatan agar sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas permukiman dan agraria bagi masyarakat	SASARAN 1.1 Meningkatnya jumlah rumah layak huni	STRATEGI 1.1.1 Penuntasan <i>Backlog</i> Kelayakan di Kawasan Permukiman Perdesaan dan Perkotaan	Pengembangan Perumahan di Jawa Tengah yang Layak Huni, Terjangkau, dan Berkelanjutan
		STRATEGI 1.1.2 Penuntasan <i>Backlog</i> Kelayakan Miskin di Kawasan Kumuh	
		STRATEGI 1.1.3 Pencegahan Pertumbuhan <i>Backlog</i> Kelayakan	
		STRATEGI 1.1.4 Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni dan Terjangkau bagi Masyarakat	
		STRATEGI 1.1.5 Penanganan Rumah Pasca Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	
		STRATEGI 1.1.6 Peningkatan Kawasan Permukiman yang Adaptif Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
		STRATEGI 1.1.7 Penanganan Kawasan Kumuh secara Kolaboratif	
		STRATEGI 1.1.8	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penyediaan PSU Permukiman Berbasis Tingkat Kerawanan Sektor	
		STRATEGI 1.1.9 Pencegahan Tumbuhnya Kawasan Kumuh Baru	
	SASARAN 1.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	STRATEGI 1.2.1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan kawasan permukiman yang adaptif, berbasis lingkungan, dan terintegrasi dengan PSU
		STRATEGI 1.2.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Rawan Kumuh	
		STRATEGI 1.2.3 Penguatan Kapasitas Kelembagaan	
		STRATEGI 1.2.4 Penyiapan Bahan Pemanfaatan dan Penguatan Rekayasa Teknologi	
		STRATEGI 1.2.5 Implementasi Pemanfaatan dan Penguatan Rekayasa Teknologi	
		STRATEGI 1.2.6 Penyediaan Data, Evaluasi, Kebijakan, Strategi, Pembinaan, dan Pengawasan	
		STRATEGI 1.2.7 Penguatan Kolaborasi dan Integrasi Peran POKJA dan FORUM PKP	
	SASARAN 2.1 Terlaksananya Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	STRATEGI 2.1.1 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Pengadaan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah
	SASARAN 2.2 Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah	STRATEGI 2.1.2 Penyelesaian Sengketa Pertanahan	
		STRATEGI 2.1.3 Reforma Agraria	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, arah kebijakan dan strategi tersebut kemudian dijabarkan dalam pentahapan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Pentahapan dalam Renstra juga disusun dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Pentahapan dimaksud disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
“Penguatan Perumahan dan Kawasan Perumkiman, serta Pengelolaan Pertanahan dalam Mendukung Ketahanan Pangan” Menguatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berkelanjutan, serta pengelolaan pertanahan yang terintegrasi dengan wilayah sentra produksi pangan	“Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pengelolaan Pertanahan dalam Mendukung Ekonomi Syariah & Wisata” Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta pengelolaan pertanahan berbasis pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah	“Pemerataan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pengelolaan Pertanahan dalam Mendukung Desa dan Industri Hijau” Memeratakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta redistribusi akses dan aset reforma agraria berbasis potensi desa dan industri hijau yang ramah lingkungan	“Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdaya Saing, serta Tertib Administrasi Pertanahan untuk Jawa Tengah Maju” Mengonsolidasi kan capaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta penyelenggaraan pertanahan untuk mewujudkan daya saing daerah menuju Jawa Tengah maju dan berkelanjutan	“Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan untuk Jawa Tengah Mandiri dan Berkelanjutan” Mengokohkan capaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan melalui konsolidasi kebijakan, inovasi tata kelola, serta penguatan kemandirian daerah dalam penyediaan hunian layak, kawasan adaptif, dan ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan menuju Jawa Tengah yang mandiri dan sejahtera.

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 3.4
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Permukiman dan Agraria bagi Masyarakat							Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	TW I-TW IV
	Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan	Terbatasnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan	12 (Tinggi)	Adanya ketimpangan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan yang tidak terkoneksi pada sistem kawasan permukiman	Tidak semua masyarakat mendapatkan akses terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan	Melakukan pemantauan, pencegahan, dan penanganan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh secara kolaboratif dari berbagai sumber pembiayaan		
		Penetapan kembali/ baru SK Kumuh Kab/Kota oleh Bupati/ Walikota	12 (Tinggi)	Kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang permukiman tidak tersedia atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Pertumbuhan luasan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah	Melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah secara terpadu dengan sektor terkait dari berbagai sumber pembiayaan		
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Terbatasnya akses terhadap rumah yang layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan sarana dan	15 (Sangat Tinggi)	Masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk	Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap rumah yang layak huni dan terjangkau	Melakukan penyediaan rumah yang layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk		

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		prasarana yang memadai untuk masyarakat secara berkeadilan		memperoleh rumah yang layak huni		masyarakat secara berkeadilan dari berbagai sumber pembiayaan		
		Program penyediaan akses air minum dan sanitasi untuk pembangunan rumah di Provinsi Jawa Tengah belum optimal	15 (Sangat tinggi)	Masih belum terintegrasinya pembangunan rumah dengan penyediaan akses air minum dan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah	Pemenuhan rumah tidak sesuai dengan kriteria rumah layak huni yang ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian PUPR (ketahanan bangunan, luas per kapita, ketersediaan akses air minum dan sanitasi)	Melakukan kolaborasi penyediaan rumah yang layak huni dengan Pemerintah Daerah maupun stakeholders terkait untuk memenuhi 4 kriteria rumah layak huni		
	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Pengadaan tanah yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional/daerah maupun rencana strategis	9 (Sedang)	Dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemrakarsa tidak sesuai dengan perkembangan area yang menjadi obyek	Proses pengadaan tanah tidak dapat dilaksanakan	Meningkatkan koordinasi Tim Persiapan Pengadaan Tanah dalam setiap tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum		
	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	Terdapat ketimpangan penguasaan tanah dan penggunaan tanah, guna dimanfaatkan oleh masyarakat.	12 (Tinggi)	Rendahnya sumber daya masyarakat terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimiliki	Tidak tersedianya akses penggunaan dan pemanfaatan tanah.	Integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi Reforma Agraria antara Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama K/L dan stakeholders terkait		

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Terdapat ketimpangan pengaturan Bank Tanah dengan upaya internalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah masyarakat	12 (Tinggi)	Rendahnya pemasyarakatan pengaturan Bank Tanah sesuai sumber daya yang dimiliki masyarakat	Tidak tersedianya media sosialisasi kepada masyarakat yang murah tepat dan mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi	Integrasi sinkronisasi kolaborasi pemasyarakatan pengaturan Bank Tanah dalam kerangka RA antara Pemda dst sama		
Sasaran 1.1. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman								
	Persentase Kawasan Kumuh	Penetapan profil pembentukan kawasan kumuh Kab/Kota sebagai dasar besaran luasan dalam SK Kumuh Kab/Kota tidak sesuai		Penggabungan/ pemisahan kawasan kumuh yang tidak sinkron antara Kab/ Kota dengan Provinsi dan Pusat	Delineasi luasan kawasan permukiman kumuh tidak jelas kewenangannya	Menyusun berita acara penetapan luasan kawasan kumuh di akhir tahun sebagai dasar perubahan/ penetapan SK Kumuh Bupati/ Walikota		
Sasaran 1.2. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni								
	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Pertumbuhan jumlah masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni berdasarkan Data Terpadu	15 (Sangat Tinggi)	Masyarakat tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memperbaiki rumahnya atau berpindah ke lokasi tempat tinggal yang	Masyarakat menempati rumah yang tidak layak huni dan/ atau pada lokasi yang tidak aman	Menyediakan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni maupun rumah terdampak bencana kepada masyarakat miskin dari berbagai sumber pembiayaan		

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kesejahteraan Sosial (DTKS)		lebih layak dan aman		(APBN, APBD Prov, Kab/Kota, CSR, BAZNAS, Swadaya,dll)		
	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat	Kenaikan harga rumah yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin non bankable	15 (Sangat Tinggi)	Masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memperoleh rumah yang layak huni, serta keterbatasan lahan untuk permukiman dengan harga yang meningkat cukup cepat setiap tahunnya	Masyarakat tidak memiliki rumah yang layak untuk ditinggali	Menyediakan bantuan pembangunan rumah baru bagi masyarakat miskin dan fasilitasi akses pembiayaan kredit mikro secara kolaboratif dengan stakeholder terkait dari berbagai sumber pembiayaan		
Sasaran 1.3. Terlaksananya Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum								

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Tidak adanya dukungan masyarakat terhadap penyediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum	12 (Tinggi)	Informasi terkait dengan penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak tersampaikan dengan lengkap	Pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat terealisasi	Menginsentifkan koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi yang membutuhkan tanah, Kantor Pertanahan, APH serta stakeholder terkait dalam penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah		
		Tidak adanya kepastian hukum hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah terhadap penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	9 (Sedang)	Kurangnya kesadaran dari pihak-pihak terkait terhadap tertib administrasi pertanahan	Pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat terealisasi	Menginsentifkan koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi yang membutuhkan tanah, Kantor Pertanahan, APH serta stakeholder terkait dalam penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah		
Sasaran 1.4. Terlaksananya Reforma Agraria di Jawa Tengah								

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria oleh GTRA	Sumber daya masyarakat sebagai obyek Penyelenggraan Reforma Agraria di Kabupaten/Kota tidak sinkron dengan rencana kerja GTRA Provinsi	9 (Sedang)	Kurangnya relevansi Renja GTRA Kabupaten/ Kota dengan Renja GTRA Provinsi	Penyelenggraaan Reforma Agraria tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan sumber daya masyarakat	Optimalisasi implementasi Renja GTRA Provinsi dalam penajaman program kegiatan Reforma Agraria pada GTRA Kabupaten/Kota sejalan dengan mekanime perencanaan pembangunan daerah.		
Tujuan 2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis								
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil rendah	9 (Sedang)	Rendahnya capaian kinerja Disperakim Prov.Jateng, serta kurangnya data dukung dalam pemenuhan 8 (delapan) area perubahan	Penurunan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	- Updating data dan kearsipan - Meningkatkan koordinasi dengan Biro Organisasi Setda Prov.Jateng"		
Sasaran 2.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Hasil Penjaminan Kualitas jauh lebih rendah dari Penilaian Mandiri Manajemen Risiko	9 (Sedang)	- OPD belum memiliki karakteristik pendekatan Manajemen Risiko - OPD telah memiliki kebijakan terkait Manajemen Risiko namun belum dikomunikasikan, diimplementasikan dan belum menetapkan selera risiko - Tim Pengelolaan Risiko Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak memahami penerapan SPIP	Menurunnya karakteristik Level Kelompok Indeks Manajemen Risiko pada Disperakim Prov.Jateng	- Melaksanakan FGD Penyelenggaraan SPIP dan Maturitas SPIP lingkup Disperakim Prov.Jateng - Meningkatkan koordinasi dengan tim APIP sebagai Penjamin Kualitas - Melakukan updating data dan kearsipan		
Sasaran 2.2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Uraian kinerja hasil survey e-SKM kurang baik	6 (Sedang)	- Kesulitan dalam memperoleh responden - Beberapa responden kurang memahami tata cara pengisian kuesioner e-SKM	Penurunan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	- Meningkatkan koordinasi dengan Bidang teknis lingkup Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam menentukan populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah - Memperkenalkan kegiatan Disperakim Provinsi Jawa Tengah kepada Masyarakat		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rincian program, kegiatan, dan sub-kegiatan beserta alokasi pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2025-2029 telah disusun sesuai dengan nomenklatur yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kualitas Permukiman dan Agraria bagi Masyarakat *									31.157.000.000		31.723.000.000		33.209.600.000		34.423.000.000		36.585.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan *	%	63,6	60,58	62,66		64,73		66,81		68,88		70,96		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan *	%	71,76	72,99	74,54		76,08		77,63		79,18		80,72		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi *	%	100	100	55,5		58,3		61,1		63,8		66,6		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum *	%	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni **									21.742.000.000		22.166.000.000		23.220.600.000		24.011.000.000		25.813.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni **	%	31,76	4,94	9,88	12.142.000.000	14,82	12.144.000.000	19,76	12.068.000.000	24,7	13.401.000.000	29,64	13.470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN ***							12.142.000.000		12.144.000.000		12.068.000.000		13.401.000.000		13.470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani ***	%	4,2	8,32	20,3	12.142.000.000	27,02	12.144.000.000	33,74	12.068.000.000	40,48	13.401.000.000	47,18	13.470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ****							180.000.000		189.000.000		100.000.000		140.000.000		200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Tersusunnya Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ****	Dokumen	2	2	1	180.000.000	1	189.000.000	1	100.000.000	1	140.000.000	1	200.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi *****							180.000.000		189.000.000		100.000.000		140.000.000		200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Tersusun dan Terverifikasi nya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi *****	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi *****	Dokumen	2	2	1	180.000.000	1	189.000.000	1	100.000.000	1	140.000.000	1	200.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ****							140.000.000		147.000.000		160.000.000		168.000.000		177.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana ****	Dokumen	1	1	1	140.000.000	1	147.000.000	1	160.000.000	1	168.000.000	1	177.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana *****							140.000.000		147.000.000		160.000.000		168.000.000		177.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Tersosialisasi nya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana *****	Orang	260	200	200	140.000.000	200	147.000.000	200	160.000.000	200	168.000.000	200	177.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ****							9.362.000.000		9.258.000.000		9.258.000.000		10.543.000.000		10.543.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana ****	Unit	210	170	175	9.362.000.000	170	9.258.000.000	170	9.258.000.000	205	10.543.000.000	145	10.543.000.000	Pokja Perumahan Umum	
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana *****							2.912.000.000		2.808.000.000		2.808.000.000		3.393.000.000		3.393.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terehabilitasi nya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi *****	Unit Rumah	175	150	125	2.912.000.000	120	2.808.000.000	120	2.808.000.000	145	3.393.000.000	145	3.393.000.000	Pokja Perumahan Umum	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana *****							6.450.000.000		6.450.000.000		6.450.000.000		7.150.000.000		7.150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun *****	Unit Rumah	35	20	50	6.450.000.000	50	6.450.000.000	50	6.450.000.000	60	7.150.000.000	60	7.150.000.000	Pokja Perumahan Umum	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ****							2.460.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterima kan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ****	Unit	17325	17000	17000	2.460.000.000	17000	2.550.000.000	17000	2.550.000.000	17000	2.550.000.000	17000	2.550.000.000	Pokja Perumahan Swadaya	
	1.04.02.1.04.0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi *****							2.460.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah *****	Rumah Tangga	17325	17000	17000	2.460.000.000	17000	2.550.000.000	17000	2.550.000.000	17000	2.550.000.000	17000	2.550.000.000	Pokja Perumahan Swadaya	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat **	%	20,33	20,39	9,65	9.600.000.000	14,48	10.022.000.000	19,3	11.152.600.000	24,13	10.610.000.000	28,95	12.343.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN ***							9.200.000.000		9.610.000.000		10.720.000.000		10.150.000.000		11.860.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Tersedianya Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan ***	%	0,48	0,73	0,69	9.200.000.000	0,97	9.610.000.000	1,28	10.720.000.000	1,57	10.150.000.000	1,91	11.860.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ****							300.000.000		100.000.000		110.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Tersusunnya Dokumen Pendataan Penyediaan Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi ****	Dokumen	N/A	2	1	300.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	
	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi *****							300.000.000		100.000.000		110.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Tersusun dan Terverifikasi nya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi *****	Dokumen	N/A	N/A	1	300.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ****							8.900.000.000		9.510.000.000		10.610.000.000		9.950.000.000		11.660.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Terlaksananya Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Unit Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi ****	Unit	253	100	100	4.450.000.000	100	4.450.000.000	100	4.450.000.000	100	4.450.000.000	125	5.500.000.000	Pokja Perumahan Umum	
	1.04.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi *****							4.450.000.000		4.450.000.000		4.450.000.000		4.450.000.000		5.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun *****	Unit Rumah	253	100	100	4.450.000.000	100	4.450.000.000	100	4.450.000.000	100	4.450.000.000	125	5.500.000.000	Pokja Perumahan Umum	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan
			Terlaksananya Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Unit Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni bagi Masyarakat Miskin ****	Unit	581	240	100	4.450.000.000	115	5.060.000.000	140	6.160.000.000	125	5.500.000.000	140	6.160.000.000	Pokja Perumahan Swadaya	
	1.04.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi *****							4.450.000.000		5.060.000.000		6.160.000.000		5.500.000.000		6.160.000.000		
			Terbangunnya Rumah Sederhana Sehat Layak Huni bagi Masyarakat	Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang Disediakan *****	Unit	581	240	100	4.450.000.000	115	5.060.000.000	140	6.160.000.000	125	5.500.000.000	140	6.160.000.000	Pokja Perumahan Swadaya	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ***							400.000.000		412.000.000		432.600.000		460.000.000		483.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya Pembinaan kepada Orang/ Badan Hukum dalam rangka Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan ***	%	100	100	6,84	400.000.000	10,04	412.000.000	13,24	432.600.000	16,43	460.000.000	19,63	483.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah ****							400.000.000		412.000.000		432.600.000		460.000.000		483.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Pembinaan kepada Orang/ Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan ****	Orang	13	44	50	400.000.000	50	412.000.000	50	432.600.000	50	460.000.000	50	483.000.000	Pokja Pembinaan dan Pengawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah *****							400.000.000		412.000.000		432.600.000		460.000.000		483.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah *****	Laporan	1	1	1	400.000.000	1	412.000.000	1	432.600.000	1	460.000.000	1	483.000.000	Pokja Pembinaan dan Pengawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman **									7.815.000.000		7.901.000.000		8.273.000.000		8.610.000.000		8.903.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Kawasan Kumuh **	%	36,4	39,42	37,34	7.815.000.000	35,27	7.901.000.000	33,19	8.273.000.000	31,12	8.610.000.000	29,04	8.903.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN ***							3.990.000.000		4.107.000.000		4.293.000.000		4.470.000.000		4.630.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Tertanggannya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh ***	%	35,87	49,49	14,9	3.990.000.000	27,32	4.107.000.000	39,73	4.293.000.000	52,15	4.470.000.000	64,56	4.630.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ****							190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ****	Laporan	3	3	10	190.000.000	10	190.000.000	10	190.000.000	10	190.000.000	10	190.000.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	
	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh *****							190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh *****	Orang	120	105	350	190.000.000	350	190.000.000	350	190.000.000	350	190.000.000	350	190.000.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Kawasan Permukiman

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ****							3.800.000.000		3.917.000.000		4.103.000.000		4.280.000.000		4.440.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Telaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ****	Ha	394,9	150	100	3.600.000.000	100	3.713.000.000	100	3.893.000.000	100	4.062.000.000	100	4.215.000.000	Pokja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *****							100.000.000		104.000.000		108.000.000		112.000.000		115.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki *****	Unit Rumah	852	584	600	100.000.000	650	104.000.000	700	108.000.000	750	112.000.000	800	115.000.000	Pokja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *****							3.500.000.000		3.609.000.000		3.785.000.000		3.950.000.000		4.100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar *****	Ha	394,8	150	15	3.500.000.000	18	3.609.000.000	20	3.785.000.000	22	3.950.000.000	24	4.100.000.000	Pokja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Kawasan Permukiman
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara an Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara an Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *****	Laporan	N/A	3	2	200.000.000	2	204.000.000	2	210.000.000	2	218.000.000	2	225.000.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	
	1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *****							200.000.000		204.000.000		210.000.000		218.000.000		225.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *****	Laporan	N/A	3	2	200.000.000	2	204.000.000	2	210.000.000	2	218.000.000	2	225.000.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Kawasan Permukiman
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN ***							925.000.000		810.000.000		850.000.000		870.000.000		887.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ***	%	N/A	100	100	925.000.000	100	810.000.000	100	850.000.000	100	870.000.000	100	887.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *****							925.000.000		810.000.000		850.000.000		870.000.000		887.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman *****	Laporan	1	1	2	400.000.000	2	410.000.000	2	430.000.000	2	440.000.000	2	457.000.000	Pokja Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman *****							400.000.000		410.000.000		430.000.000		440.000.000		457.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman *****	Laporan	1	1	2	400.000.000	2	410.000.000	2	430.000.000	2	440.000.000	2	457.000.000	Pokja Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum *****	Laporan	N/A	N/A	2	525.000.000	2	400.000.000	2	420.000.000	2	430.000.000	2	430.000.000	Pokja Kemitraan Strategis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum *****							525.000.000		400.000.000		420.000.000		430.000.000		430.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum *****	Laporan	N/A	N/A	2	525.000.000	2	400.000.000	2	420.000.000	2	430.000.000	2	430.000.000	Pokja Kemitraan Strategis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) ***							2.900.000.000		2.984.000.000		3.130.000.000		3.270.000.000		3.386.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang disediakan ***	%	40	60	16,92	2.900.000.000	35,38	2.984.000.000	55,38	3.130.000.000	76,92	3.270.000.000	100	3.386.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman *****							2.900.000.000		2.984.000.000		3.130.000.000		3.270.000.000		3.386.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Terselenggara nya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman *****	Laporan	N/A	1	1	2.900.000.000	1	2.984.000.000	1	3.130.000.000	1	3.270.000.000	1	3.386.000.000	Pokja Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman	
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman *****	Laporan	2	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Pokja Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Kawasan Permukiman
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman *****							2.800.000.000		2.884.000.000		3.030.000.000		3.170.000.000		3.286.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum *****	Lokasi	2	1	11	2.800.000.000	12	2.884.000.000	13	3.030.000.000	14	3.170.000.000	15	3.286.000.000	Pokja Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Kawasan Permukiman
Terlaksananya Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum **									400.000.000		410.000.000		430.000.000		450.000.000		470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum **	%	100	100	100	400.000.000	100	410.000.000	100	430.000.000	100	450.000.000	100	470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ***							400.000.000		410.000.000		430.000.000		450.000.000		470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terfasilitasinya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Fasilitasi Penetapan Lokasi ***	%	100	100	100	400.000.000	100	410.000.000	100	430.000.000	100	450.000.000	100	470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi ****							400.000.000		410.000.000		430.000.000		450.000.000		470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Tersusunnya Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum *****	Dokumen	7	5	2	400.000.000	2	410.000.000	2	430.000.000	2	450.000.000	2	470.000.000	Pokja Fasilitasi Pengadaan Tanah	
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum *****							400.000.000		410.000.000		430.000.000		450.000.000		470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah *****	Dokumen	7	5	2	400.000.000	2	410.000.000	2	430.000.000	2	450.000.000	2	470.000.000	Pokja Fasilitasi Pengadaan Tanah	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Pertanahan
Terlaksananya Reforma Agraria di Jawa Tengah **									1.200.000.000		1.246.000.000		1.286.000.000		1.352.000.000		1.399.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria oleh GTRA **	%	100	100	22,2	1.200.000.000	27,7	1.246.000.000	33,3	1.286.000.000	38,8	1.352.000.000	44,4	1.399.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN ***							630.000.000		650.000.000		674.000.000		720.000.000		745.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan ***	%	100	100	100	630.000.000	100	650.000.000	100	674.000.000	100	720.000.000	100	745.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							630.000.000		650.000.000		674.000.000		720.000.000		745.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	Jumlah Dokumen Permasalahan Pertanahan yang Difasilitasi ****	Dokumen	3	1	1	630.000.000	1	650.000.000	1	674.000.000	1	720.000.000	1	745.000.000	Pokja Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	
	2.10.04.1.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****							330.000.000		340.000.000		350.000.000		370.000.000		385.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Terinventarisas inya Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****	Dokumen	N/A	2	1	330.000.000	1	340.000.000	1	350.000.000	1	370.000.000	1	385.000.000	Pokja Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Pertanahan
	2.10.04.1.01.0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****							300.000.000		310.000.000		324.000.000		350.000.000		360.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****	Berita Acara	10	10	5	300.000.000	5	310.000.000	5	324.000.000	5	350.000.000	5	360.000.000	Pokja Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Pertanahan
	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE ***							570.000.000		596.000.000		612.000.000		632.000.000		654.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Terfasilitasinya Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	Persentase Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria ***	%	100	100	100	570.000.000	100	596.000.000	100	612.000.000	100	632.000.000	100	654.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							570.000.000		596.000.000		612.000.000		632.000.000		654.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Terlaksananya Penataan Akses Reforma Agraria	Jumlah Dokumen Penataan Akses Reforma Agraria ****	Dokumen	N/A	10	3	570.000.000	3	596.000.000	3	612.000.000	3	632.000.000	3	654.000.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	
	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota *****							405.000.000		425.500.000		435.500.000		450.500.000		465.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria. *****	Berita Acara	7	10	8	400.000.000	8	420.000.000	8	430.000.000	8	445.000.000	8	460.000.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Pertanahan
			Terlaksananya Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Fasilitasi Koordinasi Penataan Akses Reforma Agraria *****	Berita Acara	N/A	2	2	5.000.000	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Pertanahan
	2.10.06.1.01.0004	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi *****							165.000.000		170.500.000		176.500.000		181.500.000		188.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi *****	Laporan	2	22	4	160.000.000	4	165.000.000	4	171.000.000	4	176.000.000	4	183.000.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Pertanahan
			Terlaksananya Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kanwil BPN Provinsi dalam Pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah	Jumlah Berita Acara dalam rangka Fasilitasi Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria *****	Berita Acara	N/A	N/A	2	5.000.000	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Pertanahan

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman *									21.022.812.000		22.463.480.000		24.055.700.000		25.006.070.000		26.149.597.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman *	Angka	78	78	79		80		81		82		83		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **									990.000.000		1.105.000.000		1.150.000.000		1.165.000.000		1.210.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **	Angka	3,03	3,04	3,06	990.000.000	3,08	1.105.000.000	3,1	1.150.000.000	3,12	1.165.000.000	3,14	1.210.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							990.000.000		1.105.000.000		1.150.000.000		1.165.000.000		1.210.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ***	%	108,08	100	100	990.000.000	100	1.105.000.000	100	1.150.000.000	100	1.165.000.000	100	1.210.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****							990.000.000		1.105.000.000		1.150.000.000		1.165.000.000		1.210.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	20	990.000.000	40	1.105.000.000	60	1.150.000.000	80	1.165.000.000	100	1.210.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							515.000.000		550.000.000		580.000.000		590.000.000		620.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	9	7	7	515.000.000	7	550.000.000	7	580.000.000	7	590.000.000	7	620.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							425.000.000		485.000.000		500.000.000		505.000.000		520.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	11	9	9	425.000.000	9	485.000.000	9	500.000.000	9	505.000.000	9	520.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							25.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	2	25.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							25.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terselenggara n ya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	25.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **									20.032.812.000		21.358.480.000		22.905.700.000		23.841.070.000		24.939.597.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **	Angka	90,5	91,5	91,6	20.032.812.000	91,7	21.358.480.000	91,8	22.905.700.000	91,9	23.841.070.000	92	24.939.597.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							20.032.812.000		21.358.480.000		22.905.700.000		23.841.070.000		24.939.597.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ***	%	119,5	100	100	20.032.812.000	100	21.358.480.000	100	22.905.700.000	100	23.841.070.000	100	24.939.597.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							15.335.812.000		16.040.500.000		16.641.500.000		17.286.500.000		18.128.700.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	6	6	6	15.335.812.000	6	16.040.500.000	6	16.641.500.000	6	17.286.500.000	6	18.128.700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							14.800.812.000		15.500.000.000		16.100.000.000		16.744.000.000		17.581.200.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	79	87	87	14.800.812.000	87	15.500.000.000	87	16.100.000.000	87	16.744.000.000	87	17.581.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							420.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	12	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****							5.000.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	1	1	1	5.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semes teran SKPD *****							25.000.000		28.000.000		29.000.000		30.000.000		35.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD *****	Laporan	12	12	12	25.000.000	12	28.000.000	12	29.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****							185.000.000		190.000.000		195.000.000		200.000.000		205.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	4	185.000.000	4	190.000.000	4	195.000.000	4	200.000.000	4	205.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	X.XX.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah *****	Dokumen	2	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							160.000.000		165.000.000		170.000.000		175.000.000		180.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah *****	Dokumen	1	1	1	160.000.000	1	165.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah *****	Laporan	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah *****	Dokumen	2	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *****							110.000.000		120.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *****	%	100	100	100	110.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	78	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian *****	Dokumen	2	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai *****	Dokumen	2	2	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							50.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan *****	Orang	175	50	50	50.000.000	50	55.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan *****							10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan *****	Orang	140	130	79	10.000.000	79	15.000.000	79	15.000.000	79	15.000.000	79	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan *****	Orang	83	80	79	10.000.000	79	10.000.000	79	10.000.000	79	10.000.000	79	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							1.892.000.000		1.945.000.000		1.986.000.000		2.015.500.000		2.053.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	1.892.000.000	100	1.945.000.000	100	1.986.000.000	100	2.015.500.000	100	2.053.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor *****							50.000.000		55.000.000		60.000.000		62.500.000		65.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan *****	Paket	12	12	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	62.500.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							50.000.000		55.000.000		56.000.000		58.000.000		68.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan *****	Paket	12	12	12	50.000.000	12	55.000.000	12	56.000.000	12	58.000.000	12	68.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan *****	Paket	12	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan *****	Paket	12	12	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan *****							20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan *****	Paket	12	12	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perundang-Undangan *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan *****	Dokumen	12	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							32.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		60.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu *****	Laporan	12	12	12	32.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							950.000.000		960.000.000		970.000.000		975.000.000		975.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah *****	Laporan	12	12	12	950.000.000	12	960.000.000	12	970.000.000	12	975.000.000	12	975.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah *****	Laporan	1	1	2	50.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							350.000.000		360.000.000		370.000.000		375.000.000		380.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah *****	Dokumen	12	12	12	350.000.000	12	360.000.000	12	370.000.000	12	375.000.000	12	380.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *****							100.000.000		447.980.000		1.233.200.000		879.070.000		1.112.897.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *****	Unit	100	16	6	100.000.000	20	447.980.000	21	1.233.200.000	27	879.070.000	27	1.112.897.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		600.000.000		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	600.000.000	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel *****							25.000.000		100.000.000		115.000.000		125.000.000		220.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan *****	Paket	36	N/A	2	25.000.000	10	100.000.000	10	115.000.000	15	125.000.000	15	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							75.000.000		347.980.000		518.200.000		754.070.000		892.897.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan *****	Unit	64	16	4	75.000.000	10	347.980.000	10	518.200.000	12	754.070.000	12	892.897.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	X.XX.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							1.660.000.000		1.830.000.000		1.855.000.000		1.890.000.000		1.920.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	36	36	3	1.660.000.000	3	1.830.000.000	3	1.855.000.000	3	1.890.000.000	3	1.920.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							160.000.000		170.000.000		180.000.000		200.000.000		210.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat *****	Laporan	12	12	12	160.000.000	12	170.000.000	12	180.000.000	12	200.000.000	12	210.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							450.000.000		460.000.000		475.000.000		490.000.000		510.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan *****	Laporan	12	12	12	450.000.000	12	460.000.000	12	475.000.000	12	490.000.000	12	510.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							1.050.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan *****	Laporan	12	12	12	1.050.000.000	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****							750.000.000		785.000.000		870.000.000		1.445.000.000		1.395.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan *****	Unit	252	284	294	750.000.000	313	785.000.000	314	870.000.000	319	1.445.000.000	319	1.395.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							50.000.000		60.000.000		60.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya *****	Unit	2	2	2	50.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							230.000.000		240.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya *****	Unit	30	19	19	230.000.000	19	240.000.000	20	265.000.000	20	265.000.000	20	265.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel *****							20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara *****	Unit	20	56	56	20.000.000	75	25.000.000	75	25.000.000	75	30.000.000	75	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara *****	Unit	130	135	145	75.000.000	145	75.000.000	145	75.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							325.000.000		325.000.000		375.000.000		885.000.000		815.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	2	325.000.000	2	325.000.000	2	375.000.000	2	885.000.000	2	815.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi *****	Unit	70	72	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						50.000.000		60.000.000		70.000.000		85.000.000		90.000.000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	70	50.000.000	70	60.000.000	70	70.000.000	70	85.000.000	70	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH- OPD Provinsi

Sumber : E-Planning Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Tabel 4.2.

Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No.	Program Prioritas	Outcome/ Output	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PP. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Tersedianya rumah layak huni yang memenuhi standar kualitas bangunan dan infrastruktur pendukung bagi setiap kepala keluarga sebagai upaya meningkatkan kepastian tempat tinggal, pemerataan hunian, serta kemandirian sosial-ekonomi masyarakat	Kegiatan : Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	• Verifikasi dan Validasi dalam rangka Penyiapan Database Rumah Layak Huni dan Kawasan Kumuh
			Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub Kegiatan : • Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi • Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	• Penyiapan Data Intervensi Teknis Backlog Perumahan (Backlog Kelayakan dan Backlog Kepemilikan)
			Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	• Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
			Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	• Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

No.	Program Prioritas	Outcome/ Output	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan : • Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana • Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	• Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi
2	PA. Mendorong Pembangunan Rumah Apung Kawasan Pesisir	Tersedianya unit rumah apung yang layak huni dan aman guna memenuhi kebutuhan hunian adaptif masyarakat pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim, pasang surut air laut, serta peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan kawasan.	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	• Pembangunan Rumah Apung beserta PSU-nya di Kota Pekalongan • Pembangunan Rumah Apung beserta PSU-nya di Kabupaten Demak
			Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	
3	PT. Fasilitasi Rumah Susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta	Tersedianya hunian vertikal yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi MBR dengan dukungan kolaborasi multipihak serta infrastruktur penunjang yang meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, dan kualitas hidup penghuni.	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub Kegiatan : Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	• Kerja sama penyelenggaraan Rumah Susun MBR di Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan dalam Bab IV. Selain IKU yang berlaku bagi perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah, yang mengacu pada indikator program yang tercantum dalam Bab IV.

Indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat secara rinci dalam Tabel dibawah: :

Tabel 4.3.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	%	31,76	4,94	9,88	14,82	19,76	24,70	29,64	29,64
2	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat	%	20,33	20,39	9,65	14,48	19,30	24,13	28,95	28,95
3	Persentase Kawasan Kumuh	%	36,4	39,42	37,34	35,27	33,19	31,12	29,04	29,04
4	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria oleh GTRA	%	100	100	22,20	27,70	33,30	38,80	44,40	44,40
6	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Angka	78	78	79	80	81	82	83	83

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Tabel 4.4.
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kinerja
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	%	35,87	49,49	14,90	27,32	39,73	52,15	64,56	64,56

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan ketentuan normatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyusunan program dalam Renstra ini mengikuti struktur hierarkis yang terdapat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi acuan utama dalam perencanaan strategis dinas tersebut.

Secara normatif, dokumen Renstra ini telah dirancang untuk mencakup program atau rencana kerja selama dua tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Didalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini terdapat kajian strategis, penetapan kebijakan utama, serta proyeksi keuangan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan asumsi makro dan mikro.

Dokumen Renstra ini menguraikan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi makro dan mikro yang relevan. Kebijakan dan program yang dirancang dan diarahkan untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman yang telah diidentifikasi, antara lain pemenuhan SPM Perumahan Rakyat terkait dengan rehabilitasi dan pembangunan rumah untuk korban bencana dan relokasi program pemerintah, pengurangan rumah tidak layak huni dan backlog perumahan, peningkatan kualitas permukiman kumuh, penyediaan PSU Permukiman serta penguatan tata kelola pertanahan melalui penyelesaian sengketa dan pelaksanaan reforma agraria.

Selain itu, juga terdapat indikator keberhasilan telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Implementasi Renstra ini memerlukan komitmen yang kuat, kerja keras, dedikasi, loyalitas, dan integritas dari seluruh jajaran perangkat dinas. Pelaksanaan Renstra ini memerlukan adanya konsistensi data, definisi operasional dan formulasi perhitungan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat. Pendekatan partisipatif dan berbasis risiko menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan, guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program

Pelaksanaan Renstra ini menuntut komitmen penuh, integritas, dan profesionalisme seluruh jajaran Dinas, yang didukung oleh sistem pengendalian internal dan mekanisme monitoring serta evaluasi berkala. Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk mengukur capaian output dan outcome, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan, sehingga dapat diambil tindakan korektif secara tepat waktu. Penyesuaian Renstra dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kebijakan atau kondisi strategis yang signifikan.

Selain itu, pelaksanaan Renstra ini juga menekankan pentingnya penerapan perspektif gender dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan. Upaya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta pengelolaan

pertanahan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi juga memperhatikan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan secara adil. Dengan demikian, Renstra ini berkomitmen untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif, responsif gender, dan berpihak pada kelompok rentan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan pengelolaan pembangunan dan pengembangan pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga mendukung terwujudnya “Masyarakat Jawa Tengah yang Maju, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.” Renstra ini juga berfungsi sebagai acuan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja) dan sebagai instrumen pengendalian kinerja untuk memastikan keselarasan pelaksanaan program dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

Semarang, September 2025